

**ANALISIS NEO-LIBERALISME TERHADAP ISU *PANAMA PAPERS*
SCANDAL PADA PEREKONOMIAN NEGARA PANAMA TAHUN 2016-**

2021

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

SALWA LUTFIAH

20323280

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

**ANALISIS NEO-LIBERALISME TERHADAP ISU *PANAMA PAPERS*
SCANDAL PADA PEREKONOMIAN NEGARA PANAMA TAHUN 2016-
2021**

**HALAMAN JUDUL
SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

SALWA LUTFIAH

20323280

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Neo-Liberalisme terhadap Isu *Panama Papers Scandal* pada Perekonomian Negara Panama Tahun 2016-2021

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 2 Dewi Masitoh, S.Hub.Int., M.Sos.
- 3 Mohammad Rezky Utama, S.IP., M.Si.
- 4 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

20 September 2024,



Salwa Lutfiah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
ABSTRAK	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 <u>Latar Belakang</u>	1
1.2 <u>Rumusan Masalah</u>	6
1.3 <u>Tujuan Penelitian</u>	6
1.4 <u>Cakupan penelitian</u>	7
1.5 <u>Tinjauan Pustaka</u>	8
1.6 <u>Kerangka Pemikiran</u>	11
1.7 <u>Argumen Sementara</u>	15
1.8 <u>Metode Penelitian</u>	16
1.8.1 <u>Jenis Penelitian</u>	16
1.8.2 <u>Subjek dan Objek Penelitian</u>	16
1.8.3 <u>Metode Pengumpulan Data</u>	16
1.8.4 <u>Proses Penelitian</u>	17
1.9 <u>Sistematika Pembahasan</u>	17
BAB 2 POSISI PANAMA DALAM SITUASI POLITIK EKONOMI GLOBAL SEBAGAI SALAH SATU “TAX HAVEN COUNTRIES”	19
2.1. Awal Mula Terjadinya Kasus “ <i>Panama Papers Scandal</i> ”	21
2.2. Peran <i>Mossack-Fonseca Law Firm</i> Terhadap Isu “ <i>Panama Papers</i> ”	22
2.3. Kegagalan Negara Panama dalam Mengimplementasikan Standar Transparansi Pajak Internasional AEOI	23
2.4. Pihak-Pihak Internasional yang Terlibat	31
2.5. Definisi Variabel Ideologi dan korelasinya terhadap <i>Panama Papers Scandal</i>	34
2.6. Definisi Variabel Mode Pemerintahan dan korelasinya terhadap <i>Panama Papers Scandal</i>	35
2.7. Definisi Variabel Paket Kebijakan dan Implikasi Ekonomi <i>Panama Papers Scandal</i>	36

2.7.1. Definisi Deregulasi Perekonomian dan Implikasi Ekonomi Panama Papers	37
2.7.2 Definisi Liberalisasi Sektor Industri & Perdagangan dan Implikasi Ekonomi Panama Papers	42
2.7.3 Definisi Privatisasi Sektor Publik dan Implikasi Ekonomi Panama Papers	45
BAB 3 ANALISIS NEO-LIBERALISME TERHADAP ISU PANAMA PAPERS SCANDAL PADA PEREKONOMIAN NEGARA PANAMA TAHUN 2016-2021	47
3.1. Variabel <i>Ideology</i> dan korelasinya terhadap pada <i>Panama Papers Scandal</i>	48
3.2. Variabel <i>Mode of Governance</i> dan korelasinya terhadap pada <i>Panama Papers Scandal</i>	50
3.3. Variabel <i>Policy Packages</i> dan korelasinya terhadap pada <i>Panama Papers Scandal</i>	52
3.3.1 Deregulasi Perekonomian pada <i>Panama Papers Scandal</i> dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Panama	53
3.3.2. Liberalisasi Sektor Industri dan Perdagangan pada <i>Panama Papers Scandal</i> dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Panama	62
3.3.3. Privatisasi Sektor Publik pada <i>Panama Papers Scandal</i> dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Panama	65
BAB 4 PENUTUP	71
4.1. Kesimpulan	71
4.2 Rekomendasi	73
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Variabel Teori Neoliberalisme Menurut Manfred B. Steger & Ravi K. Roy	12
Tabel 2. Para Aktor Besar Politik yang Terlibat isu <i>Panama Papers</i>	32
Tabel 3. Manifestasi Paket Kebijakan Teori Neoliberalisme	68

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perubahan Level Korupsi Negara Panama Tahun 2017	29
Grafik 2. Opini Terhadap Cara Pemerintah Panama Melawan Korupsi	30
Grafik 3. Rasio Pajak terhadap PDB Panama Tahun 2019-2021	40
Grafik 4. Persentase FDI terhadap PDB Panama Tahun 2016-2021	41
Grafik 5. Volume “ <i>Capital Flows</i> ” Negara Panama Tahun 2015-2017	44

ABSTRAK

Skandal *Panama Papers* merupakan peristiwa kebocoran data besar-besaran dari *Mossack Fonseca Law Firm* yang berbasis di negara Panama sebagai salah satu negara suaka pajak (*Tax Haven countries*). Dokumen tersebut menjelaskan bagaimana perusahaan membantu klien dalam membangun bisnis cangkang (*shell companies*) untuk menghindari pajak, sehingga mengungkap beberapa pelanggaran keuangan berat seperti penghindaran pajak (*Tax Evasion*), pencucian uang (*Money Laundering*), dan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perspektif Neoliberalisme terhadap Isu *Panama Papers Scandal* dan kaitannya pada perekonomian negara Panama dari Tahun 2016-2021 dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan Teori Neoliberalisme oleh Manfred B. Steger dan Ravi K. Roy, tiga variabel dari perspektif ini adalah (1) *Ideology*; (2) *Mode of Governance*; dan (3) *Policy Packages*". Di mana, tiga manifestasi *policy packages* Neoliberalisme biasa dikenal dengan "D-L-P Formula" atau Deregulasi, Liberalisasi, dan Privatisasi. Sehingga, "Deregulasi" memiliki indikator zona deregulasi keuangan dan mempengaruhi penurunan *Tax-to-GDP ratio* dan FDI Panama, "Liberalisasi" memiliki indikator pasar bebas yang mempengaruhi penurunan volume "*capital flows*" Panama, serta "Privatisasi" yang memiliki indikator akuisisi *state-owned enterprises* yang memiliki implikasi yang sama dengan indikator yang lain terhadap Panama. Sehingga, analisis teori Neoliberalisme terhadap Isu *Panama Papers Scandal* terbukti memiliki implikasi negatif terhadap Perekonomian Negara Panama dari tahun 2016-2021. Sehingga, argumen dari penelitian ini terbukti relevan dengan data dan hasil analisis yang diperoleh.

Kata kunci: *Panama Papers*, Neoliberalisme, *Tax Haven*, *Money Laundering*.

ABSTRACT

The Panama Papers scandal is a massive data leak from the Mossack Fonseca Law Firm based in Panama as one of the tax haven countries. The documents explain how the company helps clients build shell companies to avoid taxes, thus exposing several serious financial violations such as tax evasion, money laundering, and others. This study aims to analyze the Neoliberalism Perspective on the Panama Papers Scandal Issue and its relationship to the Panamanian economy from 2016-2021 using a descriptive qualitative method. Based on the Neoliberalism Theory by Manfred B. Steger and Ravi K. Roy, the three variables from this perspective are (1) *Ideology*; (2) *Mode of Governance*; and (3) *Policy Packages*". Where, the three manifestations of Neoliberalism policy packages are commonly known as the "D-L-P Formula" or Deregulation, Liberalization, and Privatization. Thus, "Deregulation" has an indicator of a financial deregulation zone and influences the decline in Panama's Tax-to-GDP ratio and FDI, "Liberalization" has a free market indicator that influences the decline in Panama's "capital flows" volume, and "Privatization" which has an indicator of the acquisition of state-owned enterprises which has the same implications as other indicators for Panama. Thus, the analysis of the

Neoliberalism theory on the Panama Papers Scandal Issue has been proven to have negative implications for the Panamanian Economy from

2016-2021. Thus, the arguments from this study have been proven to be relevant to the data and analysis results obtained.

Keywords: *Panama Papers*, Neoliberalism, *Tax Haven*, *Money Laundering*.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi saat ini, isu-isu terkait dengan praktik keuangan yang melenceng dan penghindaran pajak telah menjadi perhatian utama di berbagai negara. Salah satu isu terkait hal ini yang menggemparkan dunia pada tahun 2016 adalah Isu “*Panama Papers Scandal*” (ICIJ, 2016). Isu ini juga dikenal atas peristiwa bocornya sejumlah dokumen dari firma hukum *Mossack Fonseca* yang mengungkapkan praktik keuangan yang tidak transparan dan pelanggaran hukum di Panama (Harding, 2016). Sehingga, dokumen-dokumen tersebut mengungkapkan adanya praktik penghindaran pajak, pencucian uang, dan penggunaan perusahaan bermasalah untuk menyembunyikan aset oleh individu, perusahaan, dan pejabat publik dari berbagai negara (Rettig, 2016).

Isu “*Panama Papers Scandal*” merupakan sebuah skandal besar di sektor perekonomian global yang melibatkan banyak tokoh besar di berbagai belahan dunia. Pada tanggal 3 April 2016, ketika masalah ini terbuka ke ranah publik dan mengejutkan banyak pihak, kelompok media internasional yaitu ‘*The International Consortium of Investigative Journalists*’ (ICIJ) menemukan daftar panjang pihak yang terlibat dalam kasus ini (Kenton, 2022) yaitu sebanyak 140 politisi yang berasal dari lebih dari 50 negara, selain itu sejumlah aktor ekonomi politik internasional penting juga terlibat seperti Perdana Menteri Inggris di tahun 2016 yaitu David Cameron, Perdana Menteri Islandia Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Presiden Ukraina Petro Poroshenko, Presiden Argentina Mauricio

Macri, dan masih banyak lagi (ICIJ, 2016) yang kemudian akan dijelaskan lebih lanjut pada bab 2. Selain itu, Trautman (2016) juga mengemukakan bahwa Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional menghabiskan waktu satu tahun untuk mengungkap pola kejahatan dan korupsi yang tersebar luas dalam kasus "*Panama Papers Scandal*" tersebut.

Menurut ICIJ, kasus ini merupakan salah satu kasus skandal yang termasuk dalam *whistleblower case* terbesar di dunia sampai saat ini (ICIJ, 2016). Dalam proses pengungkapannya, tercatat sejumlah 11,5 juta dokumen yang bocor ke ranah publik dalam kasus "*Panama Papers Scandal*" dan menunjukkan daftar panjang para politisi, kriminal/penjahat, beserta para selebritas yang menggunakan negara suaka pajak "*Tax Haven*" sebagai tempat untuk menyimpan harta kekayaan yang mereka miliki dan demi menghindari pajak di negara asal mereka (Mackert dan Turner, 2017).

Dokumen-dokumen yang telah disahkan oleh firma hukum tersebut berisi sekitar 214.000 akun perusahaan lepas pantai "*offshore account*" dan perusahaan cangkang "*shell corporation*" yang melibatkan individu, pejabat tinggi, dan organisasi berpenghasilan tinggi dari 200 negara sejak tahun 1970-an (Kenton, 2022). Selain itu, Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional juga menemukan bahwa meskipun mayoritas dari kepemilikan perusahaan tersebut sah secara hukum karena dibentuk melalui firma hukum, akan tetapi beberapa di antaranya telah dibentuk atau digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum seperti penipuan, penggelapan pajak, pencucian uang dan pelanggaran sanksi internasional (Harding, 2016).

Secara umum, jelas dapat dikatakan bahwa kasus skandal "*Panama Papers*" mempengaruhi stabilitas perekonomian politik global secara masif pada saat itu dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi negara Panama hingga beberapa tahun setelahnya. Transfer kekayaan dengan jumlah besar dari daftar panjang pejabat penting di dunia global masuk begitu saja kepada "*Tax Haven Countries*" seperti negara Panama (Wicaksono et al., 2021).

Hal ini kemudian sejalan dengan perspektif Neoliberalisme dalam kaitannya dengan *Panama Papers Scandal* dan negara Panama yang terkena implikasi negatif dari adanya skandal ini. Sebab, pengimplementasian perspektif Neoliberalisme sebagai kerangka dominan yang diterapkan terhadap perekonomian seluruh dunia hingga saat ini dinilai cukup relevan dengan kasus ini. Neoliberalisme begitu mempengaruhi masyarakat sipil dan institusi kewarganegaraan melalui intrusi prinsip-prinsip pasar ke dalam ranah privat sehingga meningkatnya ketimpangan pendapatan, marketisasi kewarganegaraan, dan pergeseran hubungan kekuasaan antara negara, pasar dan warga negara (Trautman, 2017).

Dalam beberapa isu ekonomi politik selama sekitar dua puluh tahun terakhir, istilah "Neoliberalisme" digambarkan sebagai "Ideologi dominan yang membentuk dunia kita saat ini". Selain itu, sejumlah akademisi juga mendefinisikan zaman modern seperti sekarang ini sebagai "Zaman Neoliberalisme" (Thorsen dan Lie, 2006). Sama halnya dengan klaim Saad-Filho dan Johnston (2005) bersama dengan penulis lain dari buku yang berjudul *Neoliberalism-A Critical Reader*, menyatakan bahwa perusahaan transnasional dan kelompok elit menjadi semakin terkonsentrasi pada kekuasaan dan kekayaan

sebagai hasil dari penerapan aktualisasi ekonomi internasional dan ideologi politik yang dikenal sebagai "Neoliberalisme" (Thorsen dan Lie, 2006) .

Skandal isu *Panama Papers* masih sangat relevan untuk dibahas dalam hal ini karena selain mempertimbangkan dari sisi urgensi penggelapan dan penghindaran pajak internasional (seperti penggunaan rekening luar negeri dan perusahaan cangkang untuk menyembunyikan aset), skandal ini juga telah menimbulkan efek domino seperti peningkatan pengawasan dan upaya pengaturan untuk mengatasi penghindaran pajak baik di tingkat nasional maupun internasional (O'Donovan et al., 2019). Skandal tersebut mendorong pemerintah dan organisasi internasional untuk mengambil tindakan, sehingga terdapat peningkatan upaya untuk bertukar informasi pajak dan meningkatkan kerja sama internasional dalam memerangi penggelapan pajak dan pencucian uang tersebut (Chohan, 2016).

Di samping itu, kasus ini juga memicu adanya ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan dan meningkatkan kekhawatiran tentang kurangnya transparansi dalam arus keuangan global (O'Donovan et al., 2019). Sebab, skandal ini kemudian berperan dalam mengungkap kerentanan pusat keuangan lepas pantai dan menimbulkan pertanyaan tentang integritas sistem keuangan global. Selain itu, pemerintah negara Panama beserta seperangkat penegak hukum internasional dan berbagai pihak yang terlibat dalam kasus ini kemudian menghadapi tekanan untuk memperkuat langkah-langkah dalam transparansi keuangan, memerangi pencucian uang dan meningkatkan regulasi di bidang keuangan dalam kaitannya dengan skandal tersebut (Obermaier, 2017). Sehingga, hal ini mendorong beberapa yurisdiksi untuk mengambil langkah-langkah untuk

memperbaiki kerangka peraturan mereka dan meningkatkan transparansi. Banyak yurisdiksi lepas pantai menghadapi kerusakan reputasi dan ditekan untuk memperkuat tindakan anti pencucian uang mereka untuk menjaga kredibilitas internasional (Trautman, 2017).

Isu "*Panama Papers Scandal*" telah mempengaruhi dunia keuangan internasional secara signifikan. Kebocoran informasi tersebut merupakan kerugian "tertinggi" dalam sejarah kebocoran data atau skandal perusahaan yang masif, sehingga mengakibatkan kerugian *market value capitalization* (nilai kapitalisasi pasar) sebesar USD \$174 *billion* bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat di dunia internasional. Hal tersebut melebihi total kerugian kapitalisasi pasar yang diakibatkan oleh skandal Enron dan Volkswagen (O'Donovan et al., 2018). Sehingga, analisis perspektif Neoliberalisme dalam *Panama Papers Scandal* dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran pemerintah Panama dalam mengaplikasikan pendekatan tersebut dan korelasinya terhadap praktik keuangan yang tidak transparan dalam *Panama Papers Scandal*. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan wawasan bagi para pengambil kebijakan dan akademisi dalam memahami analisis Neoliberalisme terhadap isu *Panama Papers Scandal* dan kaitannya dengan perekonomian Panama pada tahun 2021.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perspektif Neoliberalisme terhadap isu *Panama Papers Scandal* dan kaitannya dengan perekonomian Negara Panama dalam rentang waktu tahun 2016-2021. Analisis ini kemudian menjadi relevan karena Panama merupakan negara yang telah mengadopsi kebijakan Neoliberal dalam upaya untuk memperkuat sektor

keuangan dan telah mengambil bagian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi internasional. Implikasi skandal ini terhadap perekonomian Panama dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang kelemahan dan kekuatan pendekatan Neoliberal dalam konteks praktik keuangan yang tidak transparan di Negara Panama.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kasus ini merupakan masalah kompleks yang melibatkan daftar panjang aktor ekonomi-politik internasional di berbagai negara dan kaitannya dengan eksistensi “*Tax Haven*” sebagai negara suaka pajak. Selain itu, bagaimana kasus ini mempengaruhi negara Panama sebagai salah satu negara suaka pajak terbesar di dunia dan ikut berpengaruh besar terhadap perekonomian global Sehingga, penelitian ini akan membahas mengenai analisis Neoliberalisme terhadap isu “*Panama papers scandal*” dan kaitannya dengan perekonomian negara Panama tahun 2016-2021.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Analisis Neo-liberalisme terhadap Isu *Panama Papers Scandal* pada Perekonomian Negara Panama Tahun 2016-2021”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, riset ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis aplikasi Perspektif Neoliberalisme pada isu “*Panama papers scandal*” dan pengaruhnya terhadap perekonomian negara Panama.

2. Untuk mengetahui implikasi isu “*Panama papers scandal*” terhadap perekonomian negara Panama tahun 2016-2021.
3. Untuk menganalisis perspektif Neoliberalisme terhadap isu *Panama Papers Scandal* dan kaitannya dengan perekonomian Negara Panama dalam rentang waktu tahun 2016-2021.
4. Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran pemerintah Panama dalam mengaplikasikan pendekatan Neoliberalisme dan korelasinya terhadap praktik keuangan yang tidak transparan dalam *Panama Papers Scandal*

1.4 Cakupan penelitian

Cakupan penelitian ini dimulai dari tahun 2016 sampai tahun 2021, sebab skandal ini pertama kali terungkap ke publik di tahun 2016. Sehingga, sumber data yang aktual dan relevan kemudian dimulai dari tahun 2016. Kasus ini memberikan dampak negatif berupa pembebanan biaya fiskal yang signifikan pada negara asal sehingga hal tersebut mempengaruhi PDB negara Panama, mengingat sebagian besar PDB negara Panama berasal dari industri keuangan (ICIJ, 2016) yang mengalami penurunan pasca isu *Panama Papers* terjadi (*World Bank*, 2021). Selain itu, terdapat tren penurunan signifikan dari persentase *Foreign Direct Investment* (FDI) dari angka 9.10% di tahun 2016 menjadi 2% di tahun 2021 (*World Bank*, 2022). Ditambah, menurut hasil survei dari *Global Barometer of Corruption* di tahun 2017, Panama mengalami peningkatan level korupsi apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (*Global Corruption Barometer*, 2017). Sehingga,

penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut melalui perspektif Neoliberalisme, terkait bagaimana isu ini mempengaruhi perekonomian Panama dari tahun 2016-2021.

1.5 Tinjauan Pustaka

Terdapat berbagai penelitian yang telah membahas tentang Skandal *Panama Papers* sebelumnya, sehingga beberapa dari penelitian tersebut dijadikan acuan dalam penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang telah membahas kasus ini:

Pertama, penelitian Mackert, J. (2017) yang berjudul “*Why we need a new political economy of citizenship: Neo-liberalism, the bank crisis and the Panama Papers*”. Dalam penelitian ini, Mackert mempertimbangkan terkait persepsi dualistik yang sedang berlangsung tentang sisi negara dan sisi pasar, karena pertumbuhan kekuatan korporasi belum tentu terjadi bersamaan dengan kepentingan pasar.

Akan tetapi, penelitian ini hanya menekankan kaitan Neoliberalisme dengan sisi kewarganegaraan dan tidak secara spesifik membahas terkait analisis Neoliberalisme terhadap isu *Panama Papers* dan kaitannya dengan perekonomian negara Panama, terlebih penelitian ini juga tidak membahas kaitan isu *Panama Papers* dengan perekonomian negara Panama.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hira, A., Murata, B., & Monson, S. (2016) yang berjudul “*Understanding Offshore Finance: The Panama Papers in Perspective*” membahas tentang pengaruh ekonomi dari praktik suaka pajak dari

negara-negara ‘*Tax Havens*’ dan bagaimana negara asal dapat memperkuat regulasi untuk menghindari terjadinya praktik penghindaran pajak di masa depan, seperti peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta penguatan dasar sistem audit dan akuntabilitas sistem keuangan.

Akan tetapi, penelitian dari Hira, A., Murata, B., & Monson, S. (2016) belum secara khusus membahas tentang *Panama Papers* dalam perspektif Neoliberalisme. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjadi literatur tambahan yang akan memperkuat penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Ketiga, buku yang berjudul “*Offshore Finance Centres and Tax Havens: The Rise of Global Capital*” oleh Hampton, M. & Abbott, J. (1999) yang membahas tentang sistem perbankan internasional termasuk ‘*offshore finances*’ terhadap negara suaka pajak, institusi yang berperan penting dalam hal ini, serta pengaruh praktik ini dalam tren dan perkembangan pasar dari tahun ke tahun dengan adanya “*Offshore Finance Centres and Tax Havens*”.

Namun, penelitian ini tidak membahas terkait perspektif Neoliberalisme maupun isu *Panama papers* serta kaitan keduanya dengan perekonomian negara Panama. Sehingga, penelitian ini hanya membahas tentang “*Offshore Finance Centres and Tax Havens*” dan pengaruhnya terhadap perkembangan pasar dan kapital global.

Keempat, buku yang ditulis oleh Manfred B. Steger dan Ravi K. Roy dengan judul “*Neoliberalism: A Very Short Introduction*” yang membahas tentang gambaran umum mengenai perspektif Neoliberalisme seperti sejarah, evolusi dan implikasi penerapan Neoliberalisme. Selain itu, buku ini menunjukkan bahwa

memahami dinamika Neoliberalisme sangat penting untuk menavigasi tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi dalam masyarakat kontemporer.

Akan tetapi, buku ini secara khusus tidak membahas mengenai *Panama Papers Scandal*, mengingat buku ini diterbitkan enam tahun sebelum skandal tersebut terjadi yaitu pada tahun 2010. Sehingga, buku ini tidak membahas terkait analisis Neoliberalisme terhadap Isu *Panama Papers Scandal* terlebih kaitannya terhadap perekonomian negara Panama dari perspektif Neoliberalisme.

Kelima, yaitu referensi dokumen dari laman resmi *European Commission* (2018) dengan judul "*Is Neoliberalism Still Spreading? The Impact of International Cooperation on Capital Taxation*" yang membahas tentang penyebaran gagasan, institusi dan kebijakan Neoliberal sejak tahun 1980-an dan kaitannya dengan tren penurunan tarif pajak. Data terbaru menunjukkan adanya perbedaan antara tren tarif pajak pada keuntungan perusahaan dan pendapatan modal pribadi, serta perbedaan dalam tingkat kerjasama internasional melawan penggelapan dan penghindaran pajak.

Namun, sumber ini juga tidak menyebutkan secara khusus mengenai isu *Panama papers*, perspektif Neoliberalisme, dan korelasi di antara keduanya. Serupa dengan beberapa sumber lainnya, sumber ini tidak secara spesifik membahas terkait analisis Neoliberalisme terhadap Isu *Panama Papers Scandal* terlebih kaitannya terhadap perekonomian negara Panama dari perspektif Neoliberalisme.

Oleh karena itu, berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, dapat dilihat bahwa belum terdapat penelitian terkait pengaruh *Panama Papers* terhadap

perekonomian negara Panama pada tahun 2016-2021 melalui perspektif Neoliberalisme. Sehingga, penelitian ini secara khusus akan membahas tentang analisis Neoliberalisme terhadap Isu “*Panama Papers Scandal*” dan kaitannya dengan perekonomian Negara Panama pada tahun 2016-2021.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Neoliberalisme. Teori ini kemudian relevan terhadap kasus ini, sebab dalam beberapa isu ekonomi politik selama sekitar dua puluh tahun terakhir, istilah "Neoliberalisme" pada tahun 1990-an telah menjadi *global framework* yang sesuai untuk pembangunan ekonomi dan digambarkan sebagai ideologi dominan yang membentuk dunia saat ini. Akan tetapi, sebelum membahas terkait perspektif Neoliberalisme lebih jauh, perbedaan mendasar dari perspektif tersebut dari perspektif Liberalisme adalah terletak pada tiga manifestasi dari Neoliberalisme yang saling berkaitan yaitu (1) merupakan sebuah ideologi (*an ideology*); (2) merupakan sebuah mode pemerintahan (*a mode of governance*); dan (3) memiliki sebuah paket kebijakan (*a policy package*) (Steger dan Roy 2010, hal. 11).

Oleh karena itu, berdasarkan buku “*Neoliberalism: A Very Short Introduction*” berikut ini beberapa indikator dari Teori Neoliberalisme yang akan digunakan dalam penelitian ini (Steger dan Roy 2010, hal. 11):

Tabel 1. Variabel Teori Neoliberalisme Menurut Manfred B. Steger & Ravi

K. Roy

<i>Neoliberalism Theory</i>	<i>Variables</i>	<i>Definition</i>
	<i>An Ideology</i>	<i>Ideologies are systems of widely shared ideas and patterned beliefs that are accepted as truth by significant groups in society.</i>
	<i>A Mode of Governance</i>	<i>Mode of Governance is a certain mode of governance based on particular premises, logics, and power relations.</i>
	<i>A Policy Package</i>	<i>Policy Package is a concrete set of public policies, Neoliberalism expressed in what we like to call the 'D-L-P Formula'</i>

Sumber: Steger dan Roy (2010, hal. 11-14)

Indikator-Indikator dari tabel sebelumnya dikutip dari penelitian Manfred B. Steger dan Ravi K. Roy (2010) hal. 11-14 yang menyatakan bahwa tiga manifestasi Neoliberalisme adalah "(1) Ideologi; (2) Mode pemerintahan; dan (3) Paket kebijakan". Di mana, paket kebijakan Neoliberalisme terdiri atas, "Deregulasi dalam berbagai sektor perekonomian, adanya proses liberalisasi di sektor industri dan perdagangan, serta privatisasi berbagai aset milik pemerintah Sehingga, tiga pilar kebijakan dari Teori Neoliberalisme dapat disingkat dengan sebutan '*D-L-P Formula*' atau biasa dikenal dengan Deregulasi, Liberalisasi dan Privatisasi " (Steger dan Roy 2010, hal. 11-14).

Manifestasi pertama yaitu Ideologi adalah sistem kepercayaan dan ide terpola yang dimiliki bersama secara luas yang diterima sebagai kebenaran oleh kelompok-kelompok penting dalam masyarakat. Berperan sebagai pendukung utama neoliberalisme, individu-individu yang bersangkutan memenuhi wacana publik dengan gambaran ideal tentang dunia konsumerisme dan pasar bebas (Steger dan Roy 2010, hal. 11).

Manifestasi kedua yaitu mode pemerintahan adalah paham yang mengacu pada bentuk-bentuk pemerintahan yang didasarkan pada premis, logika, dan hubungan kekuasaan tertentu. Pemerintahan neoliberal berakar pada nilai-nilai kewirausahaan seperti daya saing, kepentingan pribadi, dan desentralisasi. Sehingga, bentuk pemerintahan neoliberal mengadopsi “*self-regulating free market*” sebagai model pemerintahan yang baik (Steger dan Roy 2010, hal. 12).

Manifestasi ketiga yang menjadi titik utama dalam penelitian ini, yaitu paket kebijakan “*policy packages*”. *Policy packages* adalah serangkaian kebijakan publik yang konkret dan sesuai dengan perspektif Neoliberalisme. Sehingga, paket kebijakan yang dimaksud terangkum dalam tiga manifestasi paket kebijakan yang akan dijelaskan lebih lanjut pada paragraf selanjutnya.

Paket kebijakan pertama yaitu deregulasi sektor perekonomian, variabel ini merupakan pelonggaran atau penghapusan regulasi yang membatasi tindakan pengawasan oleh pemerintah terhadap pasar dan perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ekonomi pasar dan proses inovasi. Indikator dari variabel ini yaitu pembentukan zona deregulasi keuangan (*Tax Haven*). Zona deregulasi keuangan merupakan kerangka peraturan liberal dan ditandai dengan rezim perpajakan yang menguntungkan bagi para pemilik aset (Hira et al., 2016). Sehingga, memungkinkan untuk perusahaan dalam negeri dan luar negeri yang ingin berinvestasi di kawasan ekonomi khusus (Steger dan Roy 2010, hal. 14).

Paket kebijakan kedua yaitu liberalisasi di sektor industri dan perdagangan. Dalam kerangka Neoliberalisme, liberalisasi mengacu pada

pengurangan intervensi dan regulasi pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Variabel ini memiliki indikator yaitu penghapusan kendali pemerintah demi mewujudkan pasar bebas (*free trade*) yang tercermin dalam pengurangan hingga penghilangan tarif serta hambatan perdagangan. Sehingga, proses liberalisasi mendorong pergeseran kekuatan dari pemerintah kepada sistem pasar bebas yang mengutamakan keuntungan sebesar-besarnya (Steger dan Roy 2010, hal. 53-54).

Paket kebijakan ketiga yaitu privatisasi di sektor publik yang merupakan proses perubahan kepemilikan aset publik menjadi milik pribadi, di mana variabel ini melibatkan indikator akuisisi perusahaan milik negara, yang biasa dikenal dengan *State Owned Enterprises (SOEs)*. Selain itu, proses ini merupakan proses yang memungkinkan pihak swasta untuk mempengaruhi pemerintah melalui kepemilikan saham langsung atau saham yang lebih besar demi persaingan global yang lebih kompetitif (Steger dan Roy 2010, hal. 41).

Oleh karena itu, sejalan dengan asumsi dasar Teori Neoliberalisme, teori ini sangat relevan dengan Isu "*Panama Papers Scandal*", sebab berbagai variabel di atas kemudian akan digunakan untuk menjelaskan aplikasi Teori Neoliberalisme dalam *Panama Papers Scandal* dan kaitannya terhadap Perekonomian Panama, dengan asumsi perekonomian Panama yang semakin menurun akibat penerapan Deregulasi, Liberalisasi dan Privatisasi. Sehingga, *Panama Papers Scandal* dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik keuangan yang tidak transparan (tindakan pencucian uang dan penggelapan pajak besar-besaran) di Negara Panama dan bagaimana hal tersebut berpengaruh terhadap perekonomian Panama di tahun 2016-2021. Selain itu, hal-

hal yang menjadi ciri khas Isu “*Panama Papers*” juga berkaitan erat dengan konsep Neoliberalisme bahwa individu secara umum akan berperilaku oportunistik dan melakukan kegiatan ekonomi yang didasarkan pada “*highest interest*” mereka (Monbiot, 2016).

1.7 Argumen Sementara

Penelitian ini melihat bagaimana skandal *Panama Papers* mempengaruhi perekonomian Panama dari sudut pandang Neoliberalisme. Sebagai negara dengan kebijakan Neoliberal yang kuat, Panama mengandalkan investasi dan sektor keuangan untuk pertumbuhan ekonomi (Obermaier, 2017). Oleh karena itu, analisis isu ini dari perspektif Neoliberalisme dapat dilakukan melalui tiga indikator dari variabel *policy packages* yaitu pertama, Deregulasi sektor perekonomian yang mempengaruhi banyaknya investasi asing yang masuk dan berujung pada tingginya angka pendaftaran *shell companies* dan ketidaktransparansian yang mengakibatkan terjadinya “*Panama Papers Scandal*”. Kedua, yaitu Liberalisasi sektor perdagangan dan industri yang mengakibatkan regulasi terkait perpajakan tidak begitu mengikat entitas perusahaan sehingga menjadi celah untuk melakukan pelanggaran di sektor keuangan. Ketiga, yaitu Privatisasi di sektor publik yang memungkinkan pihak swasta untuk mengambil alih perusahaan milik negara dan tingginya angka privatisasi mencerminkan kuasa investor asing akan selalu lebih tinggi dari pemerintah. Sehingga ketiga variabel di atas akan mempengaruhi perekonomian Panama. Selain itu, isu ini juga mempengaruhi daftar panjang negara-negara suaka pajak “*Tax Haven*” lainnya

(seperti Cayman Islands, Luxembourg, Mauritius, Andorra, Marshall Islands, dan lainnya) sebagaimana isu ini mempengaruhi negara Panama (Chohan, 2016).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dikategorikan ke dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sama halnya dengan sebagian besar metodologi penelitian yang sering kali dipakai oleh cabang ilmu "*Political science*" yaitu merupakan metode kualitatif deskriptif.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Berdasarkan topik penelitian terkait "Analisis Neoliberalisme terhadap Isu *Panama Papers Scandal* pada Perekonomian Negara Panama Tahun 2016-2021", subjek penelitian yang dilakukan terhadap topik tersebut adalah Negara Panama. Selain itu, objek dalam penelitian ini adalah kondisi perekonomian Negara Panama, khususnya pada tahun 2016-2021 pasca Isu *Panama Papers Scandal*.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan proses studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti. Sehingga, penelitian ini akan memuat berbagai pandangan dari peneliti-peneliti lainnya dan bagaimana peneliti menganalisis topik penelitian yang diangkat berdasarkan literatur-literatur yang ada.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian akan diawali dengan pengumpulan berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Setelah itu, penulis kemudian menentukan variabel penelitian dan menggunakan teori penelitian untuk menganalisis topik penelitian, sehingga menghasilkan ‘*output*’ penelitian yang diharapkan.

1.9 Sistematika Pembahasan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Selain itu, pemaparan mengenai konsep dan teori dasar serta pengertian dan karakteristik *Panama Papers Scandal*, serta konsep dan prinsip Neoliberalisme dalam Ekonomi dan kaitannya dengan studi kasus yang diambil.

BAB II. PEMBAHASAN

Bab ini mencakup tentang pemaparan lebih dalam terkait awal mula terjadinya isu “*Panama Papers Scandal*”. Lebih lanjut bab ini akan membahas mengenai posisi Negara Panama di dunia internasional dari sisi ekonomi politik global sebagai “*Tax Haven Countries*”. Di mana aktor-aktor ekonomi politik internasional yang terlibat dalam kasus ini juga akan dipaparkan dalam bab ini.

BAB III. ANALISIS

Bab ini berisi tentang hasil analisis Neoliberalisme terhadap kasus “*Panama Papers Scandal*” pada perekonomian Negara Panama dari tahun 2016-2021. Sehingga, terdiri dari terhadap tiga variabel yaitu, variabel “*Ideology, Mode of Governance, dan Policy Packages*”. Di mana, variabel *Policy Packages*

memiliki tiga manifestasi yaitu, “Deregulasi berbagai sektor perekonomian” yang memiliki indikator zona deregulasi keuangan (*tax haven*). Kedua, “Liberalisasi sektor industri dan perdagangan” dengan indikator *free trade*. Serta ketiga yaitu “Privatisasi sektor publik” yang memiliki indikator akuisisi perusahaan milik negara (*state owned enterprises*). Selain itu, bab ini juga akan membahas mengenai korelasi antara indikator-indikator dari variabel tersebut dengan keadaan ekonomi yang terjadi di negara Panama.

BAB IV. PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran dan rekomendasi terhadap penelitian yang telah dilakukan. Sehingga, bagian ini secara ringkas menyajikan seluruh temuan penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian berdasarkan hasil analisis dan interpretasi terhadap data-data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB 2

POSISI PANAMA DALAM SITUASI POLITIK EKONOMI GLOBAL SEBAGAI SALAH SATU “*TAX HAVEN COUNTRIES*”

Jika dilihat dari konteks sejarah, kerahasiaan di sektor keuangan negara Panama dan perannya sebagai perantara keuangan dalam transaksi internasional telah berkontribusi pada reputasi Panama sebagai salah satu negara surga pajak “*Tax Haven Countries*”. Sistem keuangan negara ini dibentuk oleh lokasinya yang strategis dan ikatan historisnya dengan Amerika Serikat. Sehingga hal tersebut kemudian mempengaruhi kebijakan ekonomi dan keuangan negara Panama dan menjadikan negara ini sebagai lokasi yang menarik bagi investasi dan perdagangan internasional. Di samping itu, sistem perbankan negara Panama didirikan pada awal abad ke-20 dan sejak saat itu berkembang menjadi salah satu yang terbesar di Amerika Tengah sehingga pemain penting dalam situasi ekonomi politik global terkait negara suaka pajak (Chohan, 2016).

Signifikansi dari *Panama Papers Scandal* sebagai salah satu *whistle-blower case* secara umum tercermin dari banyaknya *offshore account* para elit dunia dan informasi keuangan mereka terungkap dalam *Panama Papers*. Sebanyak 2,76 Terabyte informasi terungkap dengan 11,5 juta file dari dokumen keuangan *Mossack Fonseca*. Di samping itu, kebocoran informasi tersebut merupakan kerugian “tertinggi” dalam sejarah kebocoran data atau skandal perusahaan yang masif, sehingga mengakibatkan kerugian *market value capitalization* (nilai kapitalisasi pasar) sebesar USD \$174 *billion* bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat di dunia internasional. Hal tersebut melebihi total

kerugian kapitalisasi pasar yang diakibatkan oleh skandal Enron dan Volkswagen (O'Donovan et al., 2018).

Skandal yang melibatkan kebocoran informasi pribadi sekitar 300.000 orang dari berbagai negara. Dokumen tersebut mengungkap bagaimana banyaknya pemilik aset yang kaya memanfaatkan langkah-langkah pembatasan (*loophole*) hukum untuk menghindari pembayaran pajak. dalam kasus tertentu melakukan penipuan pajak, serta menghindari hukuman di luar negeri. Catatan ini mencakup informasi terkini sejak 2016 hingga 1970. Beberapa pemimpin dunia yang terungkap dalam dokumen ini secara langsung terkena dampak dari pengungkapannya yang lebih lanjut akan dibahas pada [Sub bab 2.4.](#) di Bab 2 terkait “Pihak-pihak internasional yang terlibat” (Prasad, 2023).

Secara umum, korelasi *Panama Papers Scandal* terhadap negara Panama terletak pada ketidakpatuhan Panama terhadap salah satu standar transparansi pajak internasional yaitu *The Automatic Exchange of Information* (AEOI) yang telah ditetapkan oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD). Sehingga, ketidaktransparansian Panama dalam sistem pajak internasional serta latar belakang Panama sebagai salah satu negara suaka pajak (*Tax haven countries*) kemudian menjadi salah satu faktor mengapa skandal ini terjadi. Kurangnya transparansi dan tingginya kerahasiaan kemudian menyulitkan pemerintah asing untuk melacak dan mengenakan pajak atas pendapatan yang dihasilkan dari berbagai transaksi yang dilakukan (O'Donovan et al., 2019).

Di mana, bocornya data dan informasi tersebut akibat *Panama Papers Scandal* kemudian memiliki dampak signifikan terhadap dunia internasional

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, dampak *Panama Papers Scandal* terhadap perekonomian Panama akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian variabel *policy package* pada bab 2 dan 3.

2.1. Awal Mula Terjadinya Kasus “*Panama Papers Scandal*”

Panama Papers merupakan kebocoran besar informasi rahasia dari firma hukum offshore “*Mossack Fonseca*” yang berbasis di negara Panama. Dokumen-dokumen tersebut mengungkap bagaimana firma hukum “*Mossack Fonseca*” membantu klien mereka dalam mendirikan perusahaan cangkang (*Shell companies*) di negara-negara yang memberikan potongan pajak yang besar bagi perusahaan-perusahaan cangkang tersebut (Bawa, 2020). Perusahaan cangkang adalah perusahaan yang tidak memiliki kegiatan usaha aktif dan hanya memiliki nama di atas kertas yang berfungsi sebagai kendaraan bagi operasi perusahaan lain, sehingga banyak digunakan untuk melindungi identitas maupun untuk menyembunyikan uang (Kinner dan Vona, n.d.). Sehingga, dalam kasus ini ditemukan lebih dari 11 juta dokumen yang berkaitan dengan lebih dari 200.000 perusahaan lepas pantai (*offshore companies*) dibocorkan ke ranah publik (Bawa, 2020).

Kasus ini diawali oleh jurnalis surat kabar Jerman *Süddeutsche Zeitung* (SZ) Frederik Obermaier dan Bastian Obermayer yang menerima informasi dan bukti dari seorang pelapor anonim. Terbitnya surat kabar Jerman *Süddeutsche Zeitung* (SZ) pada tanggal 3 April 2016 kemudian memberitakan bahwa para pemilik perusahaan-perusahaan “cangkang” tersebut menggunakan wilayah “yurisdiksi pajak rendah” untuk mengurangi beban pajak mereka ketika membeli

barang-barang mewah, melakukan investasi di luar negeri atau mencuci uang hasil kejahatan mereka (Fitzgibbon, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian dan penemuan para jurnalis tersebut, mereka akhirnya memutuskan untuk meneruskan kasus ini kepada *International Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ). Sehingga, tim global yang terdiri lebih dari 350 jurnalis untuk menyelidiki perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kasus ini kemudian dibentuk. Hasil penyelidikan tersebut menyatakan dalam sebuah laporan bahwa dokumen *Panama Papers* mengungkap sebanyak lebih dari 140 politisi dunia, selebriti, gembong narkoba, dan para penyelundup senjata menyembunyikan kekayaan dan transaksi bisnis mereka, baik secara legal maupun ilegal melalui perusahaan cangkang dan negara bebas pajak seperti negara Panama (Chohan, 2016).

Beberapa catatan merujuk pada tindakan dari tahun 1990-an dan menampilkan nama-nama pemimpin dunia, politisi, dan para kriminal di dunia internasional. Di samping itu, pada tahun 1977 dan 2017 terdapat total sekitar 214.488 perusahaan yang didirikan di negara-negara yang memiliki yurisdiksi pajak yang rendah di seluruh dunia melalui peran dari firma hukum Panama *Mossack & Fonseca*. Oleh karena itu, berdasarkan investigasi dan publikasi dari *International Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ), skandal Panama Papers ini pun meningkat menjadi skandal publik internasional (Bawa, 2020).

2.2. Peran Mossack-Fonseca Law Firm Terhadap Isu “Panama Papers”

Firma hukum “*Mossack Fonseca*” yang memiliki basis di negara Panama merupakan salah satu pemain kunci “*Offshore Finance*” di dunia global (Gallego,

2017). Definisi dari *Offshore Finance* adalah suatu negara atau yurisdiksi yang menawarkan layanan keuangan kepada non-penduduk dalam skala yang tidak sebanding dengan ukuran dan pendanaan perekonomian domestiknya (*Global Financial Integrity*, n.d.). Oleh karena itu, firma hukum ini berkaitan erat dengan studi kasus yang diangkat karena terlibat dalam proses pengungkapan sejumlah 11,5 juta dokumen yang ada menunjukkan daftar panjang aktor-aktor penting ekonomi politik global, termasuk atlet dan selebritas yang menggunakan negara Panama sebagai tempat untuk menyimpan harta kekayaan yang mereka miliki demi menghindari pajak di negara asal mereka (Mackert dan Turner, 2017). Oleh karena itu, pihak-pihak internasional yang terlibat dalam kasus ini akan dibahas lebih jauh pada bagian selanjutnya.

Dalam kurun waktu delapan tahun beroperasi *Mossack Fonseca Law Firm* telah berperan penting dalam membantu menciptakan dan menjual lebih dari 240.000 perusahaan cangkang atau “*Shell companies*” (Zamorano, 2024). Sehingga, sebagai salah satu entitas “*Offshore Finance*” terbesar di dunia, firma ini memegang teguh prinsip “*Confidentiality*” atau kerahasiaan untuk para *client*-nya yang berasal dari berbagai negara di dunia (ICIJ, 2016). Oleh karena itu, firma hukum yang berbasis di negara Panama ini berkembang dengan pesat dan mempengaruhi posisi negara Panama di dunia ekonomi politik global.

2.3. Kegagalan Negara Panama dalam Mengimplementasikan Standar Transparansi Pajak Internasional AEOI

Sebelum membahas lebih jauh mengenai alasan kegagalan negara Panama dalam mengimplementasikan *The Automatic Exchange of Information* (AEOI)

sebagai salah satu standar transparansi pajak internasional, bagian ini akan membahas mengenai pengertian dari standar tersebut terlebih dahulu. Dikutip dari Jurnal *Government Brief* oleh *Asian Development Bank* (2017), Sistem perpajakan internasional mempunyai dua standar yang disepakati secara internasional untuk pertukaran informasi dalam memenuhi tujuan perpajakan. Dua standar yang dimaksud adalah *The Automatic Exchange of Information* (AEOI) dan *Exchange of Information on Request* (EOIR) (*Asian Development Bank*, 2017). Bagian ini secara khusus akan membahas mengenai AEOI, sebab kegagalan Panama untuk menerapkan hal ini kemudian menjadi sorotan bagi dunia internasional.

The Automatic Exchange of Information (AEOI) merupakan sebuah standar terkait pembagian informasi keuangan antarnegara secara otomatis melalui *Common Reporting Standard* (CRS) atau *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA). Oleh karena itu, AEOI bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak dan mendorong kepatuhan terhadap sistem pajak agar tepat waktu dengan memperjelas bahwa lembaga keuangan akan melaporkan informasi kepada otoritas perpajakan yang ada (ADB, 2017).

Kegagalan Panama dalam menerapkan kerangka pertukaran informasi otomatis atau *The Automatic Exchange of Information* (AEOI), yang merupakan bagian penting dari standar transparansi pajak internasional disebabkan oleh beberapa faktor penting menurut (*World Customs Organization*, 2020) beberapa diantaranya yaitu:

a) Kurangnya *Political Will* dan Kerja Sama dengan Negara Lain

Lambatnya implementasi AEOI di Panama dapat disebabkan oleh kurangnya kemauan politik (*political will*) serta komitmen dari pemerintah Panama untuk mengimplementasikan AEOI secara penuh. Sebab peraturan anti pencucian uang di Panama telah dikritik karena tidak memadai dan tidak ditegakkan dengan baik. Selain itu, kurangnya kerja sama Panama dengan negara lain dalam hal ini membuat Panama mendapat kecaman karena keengganannya bertukar informasi keuangan dengan negara lain, sehingga memperlambat implementasi AEOI. Oleh karena itu, hal ini dinilai menyulitkan pemerintah asing untuk melacak dan mengadili pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya di negara Panama (*World Customs Organization*, 2020).

b) Hambatan Teknis dalam Pengimplementasian AEOI

Panama menghadapi hambatan teknis dalam mengadopsi AEOI berupa perlunya modifikasi besar-besaran terhadap infrastruktur keuangan dan pembangunan sistem baru untuk mengelola pertukaran informasi keuangan. Hambatan-hambatan teknis tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam dokumen “*IMF Country Report of Panama*” di tahun 2021 dan 2022 diantaranya yaitu:

- 1) Hambatan terkait perlunya modifikasi terhadap infrastruktur keuangan Panama disebabkan oleh ketidakmampuan Panama dalam melakukan standarisasi data sehingga data tersebut tidak bisa digunakan untuk memfasilitasi pertukaran data melalui AEOI. Panama diwajibkan untuk melakukan modifikasi besar-besaran dengan menetapkan “standarisasi” untuk format dan arsitektur data dari infrastruktur keuangannya. Selain itu, Panama tidak memiliki infrastruktur keuangan yang kuat dan aman untuk menangani

sejumlah besar data yang harus dikirim untuk pertukaran informasi ke berbagai negara di dunia.

- 2) Hambatan pembangunan sistem baru untuk mengelola pertukaran informasi keuangan meliputi urgensi atas keamanan siber (*cyber security*) Prosedur keamanan siber Panama dinilai tidak cukup untuk melindungi informasi keuangan sensitif yang akan ditransfer berdasarkan standar AEOI. Sehingga, negara ini perlu memperketat prosedur keamanan sibernya untuk menghindari pelanggaran data dan melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Selain itu, kualitas data (*data quality*) Panama tidak memenuhi persyaratan AEOI. Untuk menghindari kesalahan dan ketidakkonsistenan dalam pertukaran informasi, pemerintah harus memverifikasi bahwa datanya akurat, lengkap, dan konsisten. Sehingga, Panama perlu meningkatkan kualitas dan kemampuan analisis datanya dan untuk mendapatkan wawasan dan membuat penilaian yang tepat terkait pengimplementasian AEOI. Oleh karena itu, masalah-masalah ini telah menghambat penerapan AEOI dan mempersulit pemenuhan standar transparansi internasional (IMF, 2021).

c) Penolakan dari Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan Panama telah menyatakan penolakannya terhadap penerapan AEOI dengan alasan kekhawatiran mengenai biaya dan kompleksitas sistem. Penentangan ini telah memperlambat penerapan AEOI dan dinilai mempersulit pemerintah negara lain untuk melacak dan mengadili pelaku pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya. Sehingga, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa penolakan dari beberapa institusi keuangan Panama tersebut sebenarnya didasarkan pada “kekhawatiran akan ketidakmampuan Negara

Panama terkait kendala dalam mengimplementasikan standar AEOI dengan baik dan secara penuh”.

Oleh karena itu, institusi perbankan Panama tidak secara konsisten menentang AEOI. Meskipun beberapa lembaga telah menyatakan keberatan tentang biaya dan kompleksitas sistem, lembaga lainnya telah berpartisipasi aktif dalam proses tersebut, berkontribusi pada kemajuan negara untuk mencapai standar transparansi pajak internasional AEOI.

Dikutip dari laman resmi IMF *e-library on selected issues* (2019). Berikut ini beberapa lembaga keuangan utama Panama yang menjadi sasaran utama dari AEOI dan berusaha untuk memenuhi standar AEOI tersebut terlepas dari kekhawatiran (resistensi) mereka:

- 1) *Banco General*: Sebagai salah satu bank papan atas Panama, *Banco General* diwajibkan untuk tunduk pada undang-undang AEOI dan telah memainkan peran penting dalam upaya negara Panama untuk menerapkan standar tersebut terlepas dari banyaknya kendala dalam mengimplementasikan AEOI.
- 2) *Banco Nacional de Panamá*: Sebagai bank sentral Panama, *Banco Nacional de Panamá* bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan AEOI di seluruh negeri.
- 3) Bursa Efek Panama (*Panama Stock Exchange*): Bursa Efek Panama adalah lembaga keuangan penting yang mendukung perdagangan dan investasi di Panama. Sehingga, undang-undang AEOI berlaku untuk memastikan transparansi dan kepatuhan dari aktor-aktor investasi di Negara Panama (IMF, 2019).

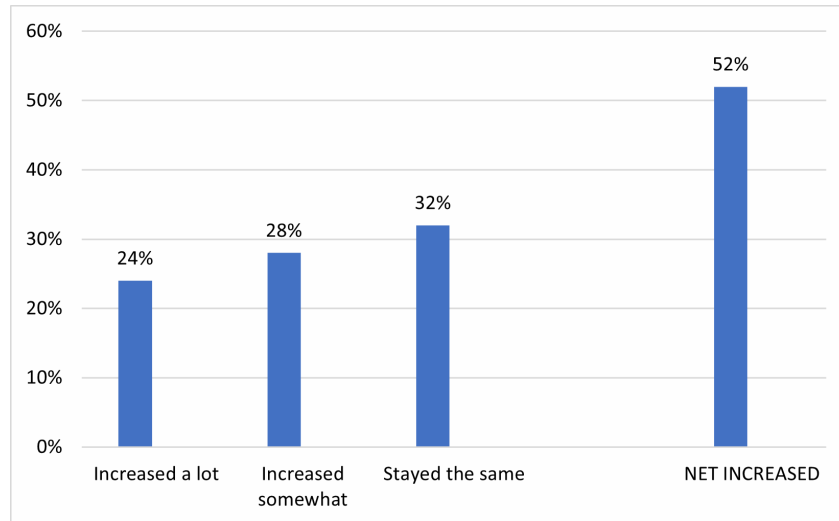
d) Tingkat Korupsi yang Tinggi dan Kurangnya Transparansi

Negara Panama telah dikecam karena kurangnya transparansi keuangan dan maraknya korupsi di negara tersebut yang secara tidak langsung menghambat implementasi AEOI (yaitu sebuah standar yang mengharuskan negara-negara yang patuh untuk memberlakukan praktik keuangan yang bersih dan transparan). Sehingga, sulit bagi pemerintah asing untuk mempercayai informasi yang diberikan oleh Negara Panama (IMF, 2019). Oleh karena itu, hal tersebut kemudian semakin menghambat negara Panama untuk patuh terhadap standar transparansi pajak internasional.

Salah satu parameter internasional dalam mengukur seberapa parah tingkat korupsi yang terjadi di berbagai negara termasuk negara Panama adalah *Global Barometer Corruption* (GCB) 9th edition. GCB merupakan sebuah survei menyeluruh yang dilakukan oleh *Transparency International* yaitu lembaga swadaya masyarakat yang didedikasikan untuk memerangi korupsi secara global. Selain itu, parameter ini juga sering digunakan untuk menilai pandangan dan sikap masyarakat umum terhadap tindakan korupsi yang terjadi di banyak negara di dunia internasional.

Oleh karena itu, sejalan dengan studi kasus yang dibahas, keadaan negara Panama di tahun 2017 merupakan keadaan tepat setelah kasus *Panama Papers Scandal* yang terjadi di tahun 2016. Sehingga, *Global Barometer Corruption* (GCB) edisi ke-9 sangat sesuai untuk menilai apakah tingkat korupsi di negara Panama masih dipengaruhi oleh isu *Panama Papers Scandal* atau berubah ke arah yang lebih baik.

Grafik 1. Perubahan Level Korupsi Negara Panama Tahun 2017

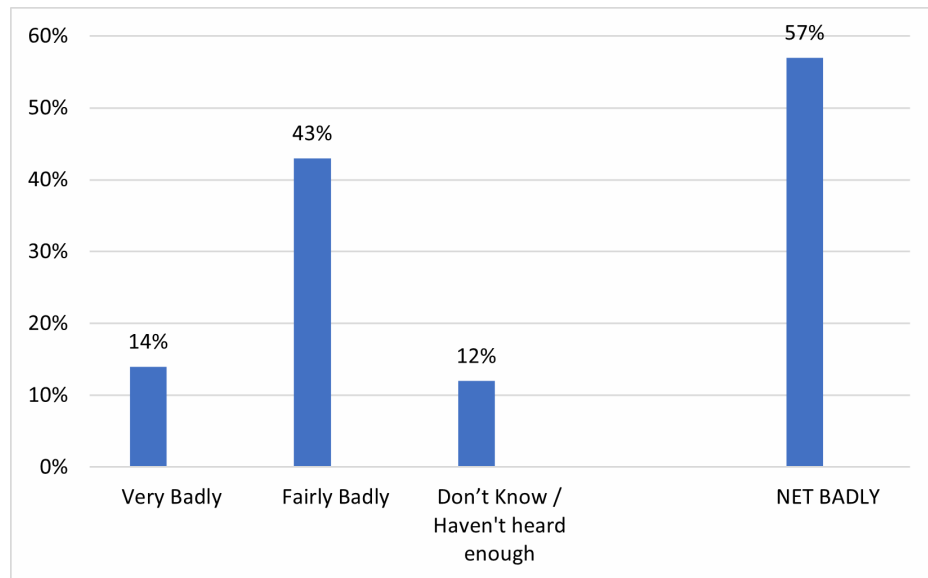


Sumber: *Global Barometer Corruption* (2017)

Dikutip dari edisi terbaru *Global Barometer Corruption 9th edition* menyatakan bahwa pada tahun 2017 terdapat 52% dari total responden yang mengklaim terjadi perubahan tren level korupsi dari Negara Panama kearah yang lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa menurut hasil dari survei GCB Panama mengalami peningkatan level korupsi apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, GCB juga mengukur opini publik dari masyarakat publik terkait seberapa baik pemerintah Panama mengatasi tindakan korupsi yang terjadi di Panama pada tahun 2017 dengan grafik berikut:

Grafik 2. Opini Terhadap Cara Pemerintah Panama Melawan Korupsi



Sumber: *Global Barometer Corruption* (2017)

Data hasil *polling* dari *Global Barometer Corruption 9th edition* yang dilaksanakan tahun 2017 juga menyatakan bahwa opini publik dari Negara Panama terhadap cara pemerintah Panama dalam mengatasi tindak korupsi berada dalam tingkat yang “cukup buruk” dengan total suara sebesar 57%. Oleh karena itu, dari hasil survei *Global Barometer Corruption* edisi ke-9 dapat disimpulkan bahwa opini publik terhadap cara pemerintah Panama menangani kasus korupsi dan upaya mereka mereka dalam memberantas korupsi berada dalam kategori yang buruk di tahun 2017.

Oleh karena itu, kegagalan pemerintah Panama dalam memberantas korupsi dan kurangnya transparansi kemudian membuat *European Union* (EU) mengkategorisasikan Panama sebagai salah satu negara yang memiliki praktik keuangan yang tidak transparan sehingga dianggap “berlawanan dengan prinsip sistem pajak internasional” (*international tax system*). Sementara itu, standar AEOI dirancang untuk meningkatkan transparansi dan kerja sama antar negara

dalam sistem perpajakan global, sehingga membantu mencegah penghindaran pajak dan memastikan bahwa pajak dibayar secara adil dan sesuai dengan hukum di setiap yurisdiksi. Akan tetapi, sejalan dengan hasil survei sebelumnya, Uni Eropa mencatat bahwa kerangka AEOI Panama masih belum diimplementasikan dengan baik (*The Society of Trust and Estate Practitioners*, 2023).

2.4. Pihak-Pihak Internasional yang Terlibat dalam *Panama Papers Scandal*

Bagian ini sebagian besar akan membahas signifikansi dari *Panama Papers Scandal* dan seberapa besar kasus ini berimplikasi terhadap situasi ekonomi dan politik global, di mana hal tersebut dapat diidentifikasi melalui aktor-aktor prominen dari sistem ekonomi politik internasional yang terlibat. Isu ini kemudian menjadi masalah global karena para pemilik aset memilih untuk menggunakan layanan jasa keuangan *offshore* seperti *Mossack Fonseca Law Firm* yang terletak di Negara Panama (dikenal sebagai yurisdiksi pajak rendah) untuk mengurangi beban pajak ketika membeli barang mewah, melakukan investasi internasional, atau mencuci hasil kejahatan mereka. Oleh sebab itu, tidak lama setelah kebocoran *Panama Papers* terungkap, dampak bagi para pihak yang terlibat menjadi signifikan (Gallego, 2017).

Sebagai contoh atas kasus ini, Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson berakhir mengundurkan diri, sementara itu Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif dilarang berpolitik seumur hidup oleh Mahkamah Agung Pakistan. Di samping itu, berdasarkan ICIJ, setidaknya 150 investigasi lain di 79 negara telah menghasilkan pemulihan sekitar \$500 juta pada Desember 2017

(Gallego, 2017). Berikut adalah aktor-aktor besar politik yang terlibat dalam isu *Panama Papers*:

Tabel 2. Para Aktor Besar Politik yang Terlibat isu *Panama Papers*

No	Aktor yang terlibat	Korelasi dengan <i>Panama Papers Scandal</i>
1.	Perdana Menteri Inggris David Cameron	Memiliki ' <i>shell company</i> ' untuk melindungi sejumlah uang maupun aset yang dirahasiakan (tidak diumumkan) untuk menghindari pajak di negara asalnya (Gladstone, 2016).
2.	Perdana Menteri Islandia Sigmundur Davíð Gunnlaugsson	Perdana Menteri Islandia dan istrinya Anna Sigurlaug Pálsdóttir membeli " <i>Wintris Inc.</i> " dan menjual 50% kepemilikannya kepada istrinya dengan "harga simbolis \$1" untuk menghindari pajak (Henley, 2016).
3.	Presiden Ukraina Petro Poroshenko	Poroshenko mendirikan <i>Prime Asset Partners Ltd.</i> dan merupakan satu-satunya pemangku kepentingan perusahaan tersebut karena menyebutkan lokasi resminya di ibu kota Ukraina (Harding, 2016a).
4.	Presiden Argentina Mauricio Macri	Merupakan direktur dan wakil presiden dari <i>Fleg Trading Ltd.</i> , serta pemegang saham di bisnis luar negeri lainnya, <i>Kagemusha S.A.</i> ,

		yang masih aktif hingga saat ini (Marris, 2016).
5.	Presiden Brazil Dilma Rousseff	Terdapat 57 orang terlibat dalam korupsi besar-besaran Petrobras (perusahaan minyak Brasil) yang menggunakan <i>Mossack Fonseca</i> untuk mendirikan <i>offshore companies</i> . Perusahaan di urutan teratas daftar tersebut terbukti dimiliki oleh Presiden Dilma Rousseff (Anholete, 2016).
6.	Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev	Terdapat keterlibatan presiden dan keluarganya dalam <i>Panama Papers</i> dan bagaimana mereka mendirikan sebuah 'kerajaan kekayaan yang tersembunyi'. Selain itu, media menyoroti korupsi yang terus berlanjut (Fitzgibbon, 2018).
7.	Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif	Tiga anak Perdana Menteri Nawaz Sharif memiliki perusahaan serta aset luar negeri yang tidak disebutkan dalam laporan kekayaan keluarganya. <i>Nielsen Enterprises Ltd</i> , <i>Nescoll Ltd</i> , dan <i>Hagon Property Holdings Ltd</i> (Khan et al., 2019).

Oleh karena itu, aktor-aktor yang terlibat dalam skandal *Panama Papers* kemudian harus menghadapi berbagai implikasi dari bocornya data mereka ke publik dikarenakan koneksi mereka dengan perusahaan luar negeri dan transaksi keuangan yang dikelola oleh *Mossack Fonseca*, di mana firma tersebut

merupakan sebuah firma hukum Panama yang menjadi pusat kebocoran tersebut. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa berbagai pemimpin dunia yang termasuk dalam transaksi keuangan yang mencurigakan kemudian mempengaruhi perjalanan karir dan kredibilitas mereka di dunia perpolitikan global akibat *Panama Papers Scandal*.

2.5. Definisi Variabel Ideologi dan korelasinya terhadap *Panama Papers Scandal*

Indikator Ideologi adalah sistem kepercayaan dan ide terpola yang dimiliki bersama secara luas yang diterima sebagai kebenaran oleh kelompok-kelompok penting dalam masyarakat. Berperan sebagai pendukung utama neoliberalisme, individu-individu yang bersangkutan memenuhi wacana publik dengan gambaran ideal tentang dunia konsumerisme dan pasar bebas (Steger dan Roy 2010, hal. 11).

Sehingga, salah satu ciri khas dari perspektif Neoliberalisme adalah dukungan terhadap pasar bebas (*free market*) sebagai filosofi utama perspektif tersebut. Menurut neoliberalisme, kebebasan individu dan pertumbuhan ekonomi bergantung pada pasar bebas dengan sedikit campur tangan pemerintah. Sehingga, menurut sudut pandang ini, cara terbaik untuk menghasilkan kekayaan dan mendistribusikan sumber daya secara efektif adalah melalui kekuatan pasar. Sebab, kebijakan-kebijakan ini mendorong dinamisme dan inovasi ekonomi yang lebih besar di mana filosofi neoliberal menyoroti pentingnya deregulasi, privatisasi, dan perdagangan bebas (Rutar, 2023). Penerapan prinsip-prinsip pasar bebas secara luas telah mempengaruhi kebijakan ekonomi di seluruh dunia dan

bukan hanya sebuah ide teoritis. Neoliberalisme mendorong pemerintah untuk mengambil pendekatan yang tidak terlalu banyak campur tangan dalam isu-isu ekonomi.

Akan tetapi terlepas dari tujuan perspektif ini, para pengkritik neoliberalisme berpendapat bahwa penekanannya pada pasar bebas sering kali memprioritaskan keuntungan di atas kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Mengingat kontroversi *Panama Papers* pada tahun 2016 yang mengekspos taktik penghindaran pajak besar-besaran yang digunakan oleh orang-orang kuat dan bisnis, sehingga membuat kritik ini sangat relevan. Sebagai konsekuensi dari kebijakan neoliberal yang mendukung deregulasi dan suaka pajak, skandal ini mengungkap bagaimana aktor-aktor tertentu dapat mengambil keuntungan dari kesenjangan dalam sistem keuangan global (Boas dan Gans-Morse, 2009).

2.6. Definisi Variabel Mode Pemerintahan dan korelasinya terhadap *Panama Papers Scandal*

Indikator mode pemerintahan adalah paham yang mengacu pada bentuk-bentuk pemerintahan yang didasarkan pada premis, logika, dan hubungan kekuasaan tertentu. Pemerintahan neoliberal berakar pada nilai-nilai kewirausahaan seperti daya saing, kepentingan pribadi, dan desentralisasi. Sehingga, bentuk pemerintahan neoliberal mengadopsi “*self-regulating free market*” sebagai model pemerintahan yang baik (Steger dan Roy 2010, hal. 12).

Neoliberalisme sebagai sebuah sistem pemerintahan menekankan peran struktur dan institusi global dalam mengatur perilaku negara dan kegiatan ekonomi. Strategi ini menganjurkan sedikit intervensi negara dalam perekonomian, dengan fokus pada pasar bebas dan kewirausahaan individu. Dalam kerangka kerja ini, organisasi internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank*, dan *World Trade Organization* (WTO) memainkan peran penting dalam menyebarkan kebijakan neoliberal melintasi batas-batas negara (Okunade, 2024).

Dalam kasus ini, bentuk pemerintahan yang berada di atas negara atau organisasi internasional yang dimaksud adalah OECD, di mana hal tersebut mencakup ketidakpatuhan Panama terhadap salah satu standar transparansi pajak internasional yaitu *The Automatic Exchange of Information* (AEOI) yang telah ditetapkan oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD). Kurangnya transparansi dan tingginya kerahasiaan kemudian menyulitkan pemerintah asing untuk melacak dan mengenakan pajak atas pendapatan yang dihasilkan dari berbagai transaksi yang dilakukan (O'Donovan et al., 2019). Oleh karena itu, penjelasan lebih lanjut terletak pada [Sub bab 2.3.](#) pada Bab 2 terkait “Kegagalan Negara Panama dalam Mengimplementasikan Standar Transparansi Pajak Internasional AEOI”.

2.7. Definisi Variabel Paket Kebijakan dan Implikasi Ekonomi *Panama Papers Scandal*

Paket Kebijakan atau *Policy packages* adalah serangkaian kebijakan publik yang konkret dan sesuai dengan perspektif Neoliberalisme. Sehingga,

paket kebijakan yang dimaksud terangkum dalam tiga manifestasi paket kebijakan. Di mana, paket kebijakan Neoliberalisme terdiri atas, “Deregulasi dalam berbagai sektor perekonomian, adanya proses liberalisasi di sektor industri dan perdagangan, serta privatisasi berbagai aset milik pemerintah Sehingga, tiga pilar kebijakan dari Teori Neoliberalisme dapat disingkat dengan sebutan ‘*D-L-P Formula*’ atau biasa dikenal dengan Deregulasi, Liberalisasi dan Privatisasi” (Steger dan Roy 2010, hal. 11-12).

Oleh karena itu, bagian ini akan memberikan konteks terkait peran pemerintah Panama dalam mengaplikasikan ketiga manifestasi paket kebijakan yang mana terbukti memiliki korelasi yang relevan terhadap *Panama Papers Scandal*. Sehingga, implikasi negatif yang diperoleh Panama kemudian dapat dilihat dari parameter-parameter yang digunakan untuk melihat seberapa besar *Panama Papers Scandal* merugikan perekonomian Panama.

2.7.1. Definisi Deregulasi Perekonomian dan Implikasi Ekonomi Panama Papers

Deregulasi perekonomian merupakan pelonggaran atau penghapusan regulasi yang membatasi tindakan pengawasan oleh pemerintah terhadap pasar dan perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ekonomi pasar dan proses inovasi " (Steger dan Roy 2010, hal. 14). Sehingga, indikator dari variabel ini merupakan Zona deregulasi keuangan (*Tax Haven*). Indikator Zona deregulasi keuangan (*Tax Haven*) merupakan kerangka peraturan liberal dan ditandai dengan rezim perpajakan yang menguntungkan bagi para pemilik aset di negara Panama. Sehingga, zona deregulasi keuangan tersebut

memungkinkan perusahaan dalam negeri dan luar negeri untuk berinvestasi di negara yang bersangkutan " (Steger dan Roy 2010, hal. 14).

Secara umum, bagian ini akan memberikan konteks terhadap analisis yang akan dibahas secara mendalam pada bab 3. Adapun deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah Panama adalah terkait:

- (1) Undang-undang pendirian perusahaan Panama yang sangat longgar (*Lax Company Incorporation Laws*), sehingga memungkinkan siapa saja untuk mendirikan perusahaan anonim yang bebas pajak dengan memerlukan sedikit pertanyaan. Oleh karena itu, hal ini mendorong pendirian bisnis cangkang yang dapat digunakan untuk menyembunyikan aset dan menghindari pajak;
- (2) *Minimal to full exemption of tax* untuk entitas perusahaan asing, sehingga Panama tidak mengenakan pajak pada perusahaan lepas pantai yang melakukan bisnis di luar yurisdiksinya. Hal ini menciptakan iklim yang kondusif untuk penghindaran pajak, termasuk pengecualian dari pajak perusahaan, pajak keuntungan modal, dan pajak lokal lainnya dan ;
- (3) Pengawasan regulasi yang terbatas. Sektor jasa keuangan Panama masih dalam tahap “*underdeveloped*” sehingga hal ini mengakibatkan pengawasan dan penegakan hukum yang tidak cukup baik untuk menghadapi pencucian uang dan aktivitas melanggar hukum lainnya karena lembaga keuangan Panama beroperasi dengan pengawasan yang lebih rendah (Schjelderup, 2016).

Oleh karena itu, terdapat dua pelanggaran berat pada *Panama Papers Scandal* yang akan dibahas dalam indikator dari variabel ini serta kaitannya

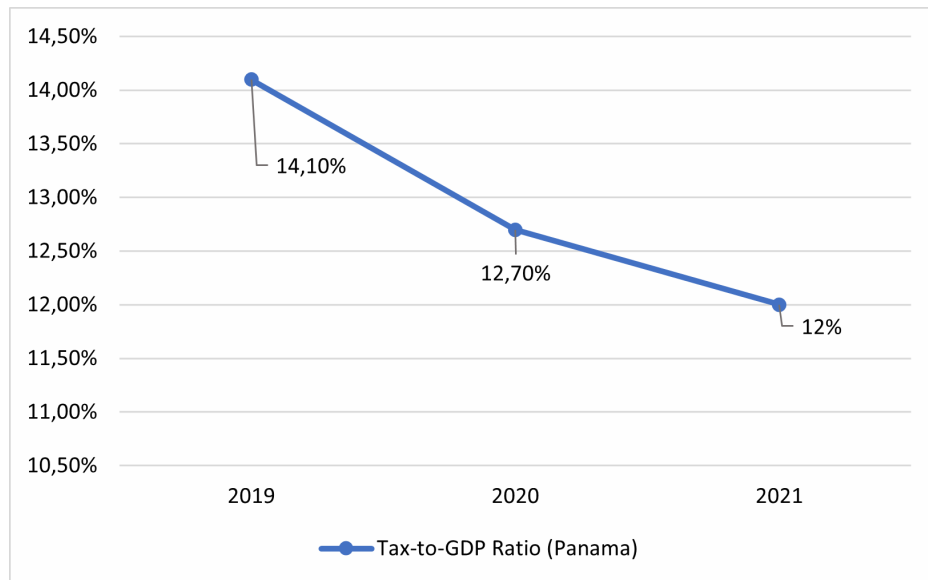
dengan perekonomian Panama dari tahun 2016-2021, diantaranya yaitu: (1) Praktik penghindaran pajak “*Tax Evasion*” dan; (2) Praktik pencucian uang “*Money Laundering*”

a. Pelanggaran ‘*Tax Evasion*’ pada *Panama Papers Scandal*

Praktik penghindaran atau penggelapan pajak secara umum merupakan sebuah tindakan ilegal di mana objek wajib pajak menutup-nutupi hingga mengabaikan kewajiban mereka dalam membayar pajak (Alldridge, 2001). Salah satu contoh dari tindakan ini adalah ketika objek pajak membayar pajak yang lebih sedikit dari seharusnya dengan cara menyembunyikan pendapatan atau informasi dari otoritas pajak. Sehingga, negara dari otoritas pajak tersebut akan mengalami kerugian akibat memperoleh penerimaan pajak yang lebih sedikit dari yang seharusnya didapatkan (Esoimeme, 2016).

Berdasarkan pengertian sebelumnya, parameter yang digunakan untuk melihat seberapa jauh variabel Deregulasi perekonomian terkait kejahatan *tax evasion* berimplikasi pada perekonomian Panama adalah “Rasio pajak terhadap PDB Panama”. Oleh karena itu, berikut ini merupakan grafik yang menunjukkan Rasio pajak terhadap PDB negara Panama dari tahun 2019-2021:

Grafik 3. Rasio Pajak terhadap PDB Panama Tahun 2019-2021



Sumber: *Economic Commission for Latin America and the Caribbean* (2021)

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa terdapat tren penurunan rasio pajak terhadap PDB (*Tax-to-GDP Ratio*) Panama dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Pada tahun 2019, kontribusi pajak terhadap total PDB Panama masih sangat rendah yaitu di angka 14,10%. Hal ini semakin diperparah oleh adanya “Pandemi Covid-19” yang terjadi di tahun 2020, sehingga menyebabkan pendapatan negara dari sektor pajak semakin berkurang di tengah tingginya angka pelanggaran terkait penghindaran pajak di Negara Panama yaitu sebesar 12,70% dan tercatat di angka 12% pada tahun 2021 (*Economic Commission for Latin America and the Caribbean*, 2021).

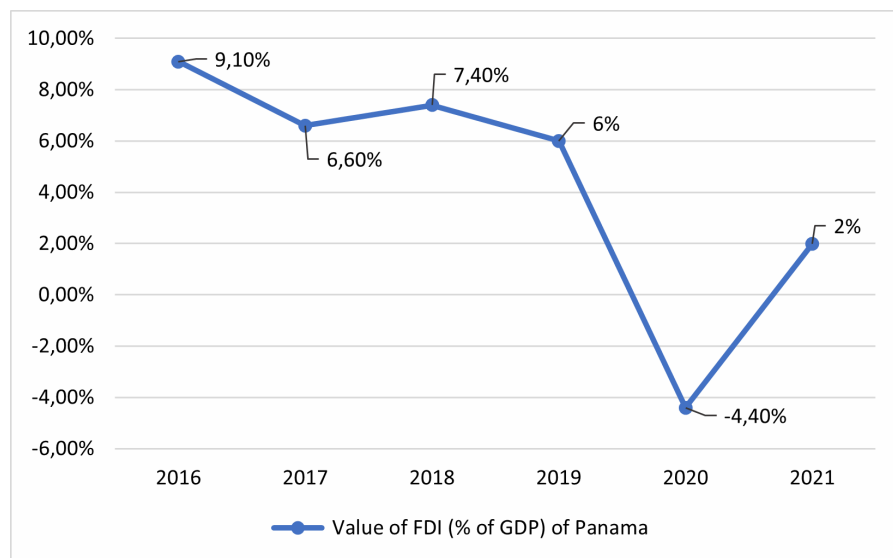
b. Pelanggaran ‘*Money Laundering*’ pada *Panama Papers Scandal*

Praktik pencucian uang dapat didefinisikan sebagai proses mengubah "uang gelap" atau ‘*dark money*’ yang diperoleh dari sumber-sumber terlarang seperti perdagangan narkoba, pemerasan, dan penyelundupan kemudian diolah melalui transaksi atau aktivitas yang sah, sehingga menjadi uang yang legal atau sah.

Akan tetapi di sisi lain, sumber asli dari uang tersebut dengan sengaja disembunyikan dari pihak berwenang (Thanasegaran dan Shanmugam, 2007).

Berdasarkan pengertian sebelumnya, parameter lain yang digunakan untuk melihat seberapa jauh variabel Deregulasi perekonomian terkait dengan kejahatan *money laundering* yang berimplikasi pada perekonomian Panama adalah “*Foreign Direct Investment*”. Oleh karena itu, berikut ini merupakan grafik yang menunjukkan data terkait persentase *Foreign Direct Investment* (FDI) terhadap PDB Negara Panama dari tahun 2016-2021:

Grafik 4. Persentase FDI terhadap PDB Panama Tahun 2016-2021



Sumber: *World Bank* (2022)

Secara umum, data di atas merepresentasikan terjadinya tren penurunan angka persentase dari Investasi Langsung Luar Negeri atau yang biasa dikenal sebagai *Foreign Direct Investment* (FDI) terhadap total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Panama dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Pada tahun 2016, FDI Panama berkontribusi sebesar 9,10% terhadap total PDB Panama. Akan tetapi

setelah kasus *Panama Papers Scandal* yang terjadi di tahun yang sama, terjadi penurunan sebesar 2,50% menjadi 6,60% di tahun 2017. Walaupun terjadi kenaikan di tahun 2018 menjadi 7,40%, total FDI di tahun ini tidak sebesar di tahun 2016. Begitupun di tahun-tahun selanjutnya tren dari kontribusi FDI terhadap PDB Panama cenderung menurun, terlebih dengan adanya Pandemi Covid 2020 menjadikan persentase tersebut jatuh di angka -4,40% dan mengalami kenaikan sejalan dengan terjadinya pemulihan ekonomi di tahun 2021 pasca Pandemi (*World Bank*, 2022).

2.7.2 Definisi Liberalisasi Sektor Industri & Perdagangan serta Implikasi Ekonomi *Panama Papers*

Liberalisasi di sektor industri dan perdagangan sebagai bagian dari teori Neoliberalisme merupakan proses pengurangan intervensi serta regulasi pemerintah di berbagai sektor (khususnya sektor industri dan perdagangan), sehingga meningkatkan peran pasar swasta maupun perdagangan internasional. Liberalisasi ditandai dengan elemen-elemen kunci seperti pengurangan atau penghapusan hambatan perdagangan (seperti hambatan non-tarif dan kuota) untuk memfasilitasi kelancaran perdagangan serta investasi internasional. Selain itu, liberalisasi juga menerapkan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pasar dengan memprioritaskan mekanisme pasar daripada intervensi pemerintah. Oleh karena itu, indikator dari variabel liberalisasi sektor industri dan perdagangan adalah *free trade* atau perdagangan bebas " (Steger dan Roy 2010, hal. 53-54).

"*Free trade* atau perdagangan bebas berdasarkan Artikel III GATT adalah konsep perdagangan yang bebas akan peraturan atau regulasi yang bersifat

mendiskriminasi produk atau komoditas hasil produksi dalam negeri maupun luar negeri.” (Driesen 2000, hal. 15).

Proses liberalisasi dan pengimplementasian kebijakan Neoliberalisme dalam sektor perbankan Panama dimulai pada pembentukan Undang-Undang Dekrit 9 tahun 1998 (*Decree Law 9 of 1998*) yang mengawasi sektor perbankan di Panama. Pada saat itu, dekrit ini telah mengalami revisi agar sesuai dengan norma-norma internasional kontemporer. Oleh karena itu, perubahan ini berkonsentrasi pada penguatan kewenangan otonomi pengaturan dan pengawasan dari “*Superintendency Bank*”. Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap bank dan induk dari berbagai bank yang ada di Panama (“Historical Review | *Superintendencia de Bancos de Panamá*,” n.d.).

a. Regulasi terkait “*Strict Banking Secrecy Laws*” pada sektor perbankan Panama

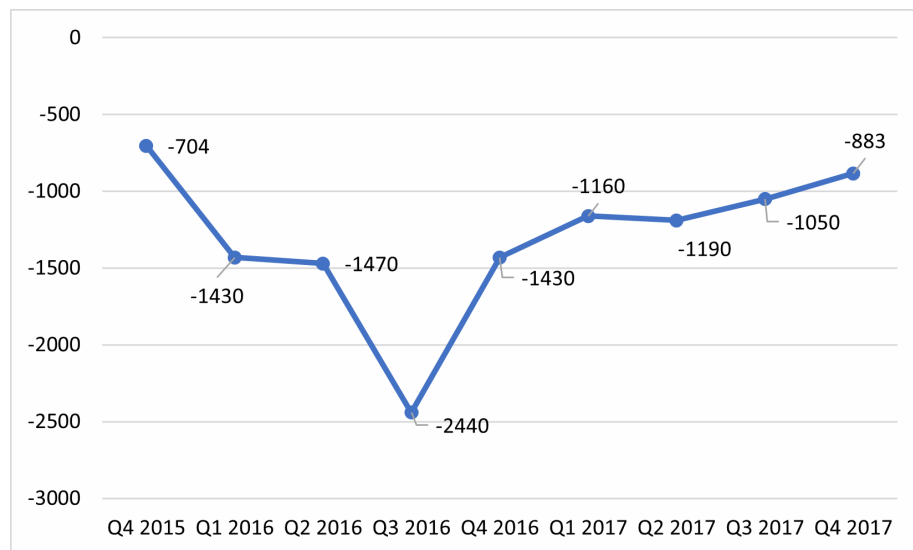
Berikut ini beberapa peraturan yang sudah ada sebelumnya dan mengatur prinsip kerahasiaan di negara Panama:

1. Menurut *Cabinet Decree 238's Article 74*, dinyatakan secara tegas terkait pelarangan untuk menyelidiki urusan pribadi nasabah bank atau bank itu sendiri, kecuali jika informasi tersebut diminta sesuai dengan hukum atau diperlukan untuk konsolidasi statistik global. Jika Statuta ini dilanggar, maka ketentuan *Cabinet Decree 238's Article 101* akan berlaku.
2. Menurut *Cabinet Decree 238's Article 101*, siapa pun yang memberikan informasi yang melanggar keputusan tersebut atau larangan-larangannya yang tidak ditentukan hukumannya akan dikenakan denda uang yang

ditetapkan oleh Komisi Perbankan, selain hukuman pidana dan perdata yang berlaku (*Offshore Protection*, 2022).

Berdasarkan pengertian sebelumnya, parameter yang digunakan untuk melihat seberapa jauh prinsip kerahasiaan dalam *Panama Papers Scandal* berimplikasi pada perekonomian Panama adalah “*Capital Flows*”. Oleh karena itu, berikut ini grafik yang menunjukkan data terkait Volume “*Capital Flows*” setiap kuartal Panama dari tahun 2015-2017:

Grafik 5. Volume “*Capital Flows*” Negara Panama Tahun 2015-2017



Sumber: *Trading Economics* (2018)

Berdasarkan grafik di atas, jelas dapat dilihat bahwa telah terjadi penurunan signifikan terhadap volume arus kapital “*capital flows*” dari negara Panama setelah *Panama Papers Scandal* terjadi. Pada Q1 tahun 2016, arus kapital Panama menurun sebanyak 726 juta PAB (*Panamanian Balboa* sebagai mata uang Panama) dari Q4 tahun 2015 yang semakin mengalami penurunan signifikan

menjadi -2.440 juta PAB atau sebesar -2.4 *billion* USD pada Q3 tahun 2016 (*Trading Economics*, 2018).

Sehingga, jika dibandingkan dengan Q4 tahun 2015 maka total penurunan yang dialami sebesar -1.736 juta PAB atau setara dengan -\$1.736 juta USD atau -1.7 *billion* USD. Sehingga, pada kuartal akhir tahun 2016, dan sepanjang kuartal tahun 2017 dapat terlihat bahwa arus kapital cenderung mengalami stagnasi dan masih berada pada angka rata-rata -1.1 *billion* USD (*Trading Economics*, 2018).

2.7.3 Definisi Privatisasi Sektor Publik dan Implikasi Ekonomi *Panama Papers*

Privatisasi sektor publik mengacu pada penjualan aset negara kepada sektor swasta. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan prospek produktivitas serta demi ekspansi perekonomian yang lebih besar untuk negara yang bersangkutan, dalam hal ini yaitu Negara Panama. Di mana, indikator dari variabel privatisasi sektor publik adalah akuisisi. Proses akuisisi merupakan sebuah proses transaksi yang terjadi ketika suatu perusahaan membeli seluruh atau sebagian saham atau aset perusahaan lain (*Corporate Finance Institute*, 2015). Di mana dalam kasus ini, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Manfred B. Steger dan Ravi K. Roy, akuisisi yang dimaksud adalah akuisisi terhadap *State Owned Enterprises* (SOEs) (Steger dan Roy 2010, hal. 41). Di mana, indikator ini akan dijelaskan lebih lanjut pada analisis di Bab 3.

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan dalam bab ini, dapat disimpulkan bahwa data mengenai keterkaitan tiga variabel yang digunakan yaitu

deregulasi di berbagai sektor perekonomian, liberalisasi sektor industri dan perdagangan, serta privatisasi sektor publik terhadap *Panama Papers Scandal* sesuai dengan keadaan yang terjadi di Negara Panama. Sehingga, membuat publisitas yang memiliki implikasi negatif terhadap perekonomian Negara Panama. Sehingga, bagian yang telah dibahas sebelumnya akan dijelaskan lebih mendalam pada bagian selanjutnya di bab 3 yaitu bagian analisis berdasarkan konteks yang telah dijabarkan pada bagian ini.

BAB 3

ANALISIS NEO-LIBERALISME TERHADAP ISU *PANAMA PAPERS SCANDAL* PADA PEREKONOMIAN NEGARA PANAMA TAHUN 2016-2021

Bab ini secara khusus akan membahas tentang analisis Neoliberalisme terhadap isu *Panama Papers Scandal* pada perekonomian negara tersebut dari tahun 2016-2021. Di mana Teori Neoliberalisme mempunyai tiga variabel yang telah disebutkan pada Bab I. Variabel-variabel tersebut diantaranya yaitu; (1) Ideologi; (2) Mode pemerintahan; dan (3) Paket kebijakan". Di mana, paket kebijakan Neoliberalisme terdiri atas, "Deregulasi dalam berbagai sektor perekonomian yang memiliki indikator zona deregulasi keuangan (*tax haven*), adanya proses liberalisasi di sektor industri dan perdagangan dengan indikator perdagangan bebas (*free trade*), serta privatisasi berbagai aset milik pemerintah yang memiliki indikator akuisisi *State Owned Enterprises (SOEs)* atau yang biasa dikenal dengan akuisisi perusahaan milik negara atau pemerintah oleh para pemilik aset swasta (Steger dan Roy 2010, hal. 11-54).

Oleh karena itu, bab ini akan terbagi menjadi tiga bagian yang merepresentasikan masing-masing dari tiga variabel yang akan digunakan untuk membahas studi kasus ini beserta data relevan terkait pengaruh atau implikasi masing-masing variabel terhadap perekonomian negara setelah kasus *Panama Papers Scandal* terjadi dari tahun 2016-2021 khususnya pada [Sub bab 3.3](#) terkait variabel *policy packages*.

3.1. Variabel *Ideology* dan korelasinya terhadap pada *Panama Papers Scandal*

Terlepas dari kerugian yang dialami oleh berbagai pihak di dunia internasional dan tidak terkecuali negara Panama akibat terjadinya *Panama Papers Scandal*, sebagai salah satu negara yang perekonomiannya bertumpu pada

penyediaan jasa layanan keuangan dan perbankan, Panama telah melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan perspektif Neoliberalisme demi mewujudkan sistem perekonomian yang didasarkan pada mekanisme pasar dan minim akan intervensi dari pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah Panama seperti deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi sebagai bentuk dari *policy package* atas ideologi yang dititikberatkan pada prinsip *free market* atau pasar bebas.

Di samping itu, *Panama Papers* adalah contoh konkret tentang bagaimana para pemilik aset yang berkuasa dapat menggunakan ideologi neoliberal untuk lebih mendapatkan hak-hak istimewa mereka. Meskipun perspektif Neoliberalisme mempromosikan gagasan tentang kesetaraan di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama, namun pada kenyataannya hal-hal seperti regulasi yang tidak mengikat dan pengawasan yang minim dan hanya menguntungkan pihak tertentu seringkali menunjukkan peningkatan ketidaksetaraan dan konsentrasi kekayaan di antara segelintir orang saja. Kesenjangan ini menimbulkan keprihatinan serius mengenai implikasi secara etis dari *free market* dan dampaknya terhadap seluruh masyarakat. Oleh karena itu, hal ini kemudian mempertanyakan anggapan bahwa pasar yang tidak dibatasi (*unregulated market*) selalu menghasilkan hasil yang adil bagi semua pihak.

Pada dasarnya, neoliberalisme mendorong minimalisasi intervensi negara dalam perekonomian dengan alasan bahwa pasar bebas pasti akan menghasilkan kesejahteraan bagi semua. Para penganut paham ini mengatakan bahwa deregulasi, privatisasi, dan pengurangan pengeluaran pemerintah akan menciptakan lingkungan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, seperti

yang ditunjukkan oleh *Panama Papers Scandal*, pandangan dunia ini sering kali mengarah pada ketidakadilan sistematis yang menguntungkan para pemilik aset dan meminggirkan masyarakat berpenghasilan rendah. Data yang dicuri dan bocor tersebut kemudian mengungkapkan bagaimana orang dan perusahaan menggunakan negara suaka pajak seperti Panama untuk menghindari pajak, mengikis sumber daya publik (*public resources*) yang kemudian sangat penting bagi program kesejahteraan sosial di berbagai negara di dunia internasional.

Oleh karena itu, fakta bahwa *Panama Papers Scandal* merupakan celah yang menimbulkan permasalahan dari variabel Neoliberalisme sebagai sebuah ideologi, tidak menyanggah situasi ideal yang seharusnya terjadi apabila variabel *Mode of Governance* dari perspektif Neoliberalisme berjalan dengan baik. Sebab, terjadinya *Panama Papers Scandal* sebagian besar dipengaruhi oleh “ketidakmampuan” Panama sebagai *Tax Haven Countries* untuk menegakkan prinsip transparansi dari sistem perpajakan internasional (*non-compliant*) yang mana akan dibahas lebih lanjut pada [Sub bab 3.2.](#) yaitu bagian selanjutnya.

3.2. Variabel *Mode of Governance* dan korelasinya terhadap pada *Panama Papers Scandal*

Tata kelola global (*Mode of Governance*) merupakan salah satu aspek penting dari ideologi Neoliberalisme. Dengan menciptakan kerangka kerja yang serupa untuk hukum yang mengatur seluruh aspek perdagangan dan ekonomi internasional (dengan mendukung nilai-nilai akuntabilitas dan keterbukaan), *Mode of Governance* ini berusaha menjamin perlakuan yang adil bagi semua pemain di pasar internasional. Agenda neoliberal dalam konteks ini sangat

menekankan pada deregulasi dan pengurangan intervensi pemerintah, yang seharusnya menghasilkan lingkungan perdagangan dan investasi yang lebih adil secara teori. Akan tetapi dalam penerapannya, prinsip-prinsip tersebut sering kali dipertemukan dengan perbedaan atau 'Gap' yang besar, terutama dalam hal regulasi keuangan dan perpajakan.

Oleh karena itu, dalam rangka mempromosikan kerangka kerja sama di antara pemerintah untuk memerangi penghindaran pajak dan menjaga kepatuhan terhadap norma-norma global, prinsip *governmentalisme* sangat diperlukan dalam perjanjian pajak internasional yang bertujuan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan ini.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab 2 bagaimana Panama gagal untuk mengimplementasikan standarisasi transparansi pajak internasional yaitu AEOI (*The Automatic Exchange of Information*) oleh OECD disebabkan oleh beberapa faktor. Perkembangan dari firma hukum *Mossack Fonseca* dan prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) nya yang sejalan dengan karakteristik negara Panama sebagai salah satu negara suaka pajak, kemudian memiliki dua sisi yang bertentangan. Di salah satu sisi, negara suaka pajak sangat erat kaitannya dengan konstruksi hukum yang tidak hanya mencakup tarif pajak rendah sampai nol, tetapi juga undang-undang yang berkaitan dengan kerahasiaan atau *confidentiality* dari berbagai rekening keuangan *client* yang ada (Dharmapala, 2023). Hal tersebut kemudian menjadi alasan mengapa banyak entitas perusahaan global yang memilih untuk menyimpan asetnya di negara suaka pajak seperti Negara Panama.

Namun di sisi lain, hal ini berbanding terbalik karena sifat *confidential* dari negara Panama tidak terimplementasikan dengan baik dan menjadi tantangan baru bagi negara ini untuk memulihkan citranya setelah dokumen-dokumen penting yang bocor pada tahun 2016 di ranah global (ditandai oleh terjadinya kasus *Panama Papers Scandal* pada saat itu). Di saat yang sama, prinsip *confidential* juga bertentangan dengan standar praktik keuangan yang dianggap bersih oleh standar internasional sehingga menjadi bumerang bagi Negara Panama. Salah satu penyebab utamanya adalah kegagalan Panama untuk menerapkan kerangka pertukaran informasi otomatis atau *The Automatic Exchange of Information* (AEOI). Standar AEOI merupakan sebuah standar terkait pembagian informasi keuangan antarnegara secara otomatis untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang merupakan bagian penting dari standar transparansi pajak internasional (STEP, 2021).

Oleh karena itu, kesenjangan dalam sistem tata kelola perbankan Panama telah diperjelas oleh ketidakmampuan negara ini untuk melaksanakan perjanjian internasional yang telah disebutkan sebelumnya. Di mana hal ini juga telah diatur dalam regulasi “*Strict Banking Secrecy Laws*” yang terletak pada [Sub bab 2.7.2](#) di bab 2. Dengan adanya regulasi ini sistem hukum Panama mendapat kecaman karena kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, terutama dalam hal mengatur sektor keuangan lepas pantai (*Offshore finance*) meskipun Panama merupakan salah satu pemain utama dalam perbankan internasional.

Kontroversi *Panama Papers* kemudian mengekspos bagaimana berbagai pihak dan bisnis perusahaan mengambil keuntungan dari celah hukum ini untuk

melakukan berbagai macam kejahatan di bidang keuangan seperti penghindaran pajak, pencucian uang, dan lain sebagainya. Dengan demikian, tindakan Panama tidak hanya menghambat dan berlawanan dengan upaya-upaya tata kelola global (*Mode of Governance*), tetapi juga melanjutkan masalah-masalah mendasar seperti ketidaksetaraan dan penyelewengan keuangan di dalam negeri karena negara ini tidak mampu menyesuaikan diri dengan standar internasional yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, skandal ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip neoliberalisme dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang serius jika ada sistem yang lemah dalam hal akuntabilitas dan transparansi.

3.3. Variabel *Policy Packages* dan korelasinya terhadap pada *Panama Papers Scandal*

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bagian ini secara khusus akan menganalisis lebih jauh terkait pengaruh dari aplikasi “Analisis Neoliberalisme terhadap Isu *Panama Papers Scandal* pada Perekonomian Negara Panama Tahun 2016-2021” di mana beberapa indikator di atas merepresentasikan pemikiran dari Manfred B. Steger (2010) yang menyatakan dalam bukunya yang berjudul “*Neoliberalism: A very short introduction*” bahwa tiga pilar kebijakan (*Policy Packages*) Neoliberalisme adalah "Deregulasi dalam berbagai sektor perekonomian, Liberalisasi di sektor industri dan perdagangan, serta privatisasi berbagai aset milik pemerintah Sehingga, beliau mengemukakan bahwa manifestasi dari Teori Neoliberalisme dapat disingkat dengan sebutan ‘*D-L-P Formula*’ atau biasa dikenal dengan Deregulasi, Liberalisasi dan Privatisasi ". Di

mana ketiga paket kebijakan ini akan dianalisis lebih lanjut pada bagian berikutnya.

3.3.1 Deregulasi Perekonomian pada *Panama Papers Scandal* dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Panama

Seperti yang telah disebutkan dalam bab 2, variabel deregulasi di sektor perekonomian secara umum merupakan peraturan-peraturan substansial yang akan dilonggarkan atau bahkan dieliminasi untuk membuat pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Di mana variabel ini memiliki indikator berupa *Financial Deregulation Zone* (Steger dan Roy 2010, hal. 14). Di mana sebagai salah satu negara suaka pajak (*Tax Haven Countries*), *Panama Papers Scandal* merupakan titik awal terjadinya ketidaktransparansian dan menimbulkan pertanyaan tentang integritas sistem keuangan global (Hira et al., 2016).

Variabel ini sangat penting untuk dibahas dalam kaitannya dengan kasus *Panama Papers Scandal* sebab deregulasi perekonomian yang umumnya ditujukan bagi perusahaan atau korporasi memungkinkan terjadinya kontroversi *Panama Papers* yang mengungkap longgarnya regulasi di sektor keuangan Panama, sehingga membuat firma hukum *Mossack Fonseca* untuk beroperasi dengan pengawasan yang minim dari pemerintah Panama. Selain itu akibat deregulasi negara Panama, kemampuan perusahaan-perusahaan untuk mendirikan perusahaan-perusahaan cangkang (*shell companies*) dan rekening luar negeri (*offshore account*) tanpa pengawasan yang memadai menyebabkan meluasnya penghindaran pajak dan pelanggaran di sektor keuangan dari Negara Panama (Evertsson, 2020).

Negara Panama sejak lama telah memiliki reputasi sebagai negara *Tax haven* atau negara suaka pajak dengan struktur regulasi perpajakan yang lemah untuk menarik investasi internasional dan mendorong transaksi keuangan luar negeri terjadi. Akan tetapi, kurangnya peraturan dan prosedur penegakan hukum yang efektif dapat menghambat kapasitas pemerintah untuk mendapatkan penerimaan negara dari sektor pajak yang memadai. Sehingga, iklim sektor keuangan Panama sebagai negara *Tax haven* mendorong penghindaran pajak dan pengalihan keuntungan khususnya dalam konteks industri keuangan Panama dari kacamata internasional (Peck, 2016).

Oleh sebab itu, Zona deregulasi keuangan yang dibentuk untuk para pemilik aset di negara Panama sebagai salah satu negara suaka pajak (*tax haven*), sehingga menyebabkan terjadinya ketidaktransparansian di sektor keuangan global dan menimbulkan pertanyaan tentang integritas sistem keuangan global secara umum.

Sehingga, apabila berbicara mengenai indikator pembentukan zona deregulasi keuangan (*Tax Haven*) negara Panama dan kaitannya dengan variabel deregulasi sektor perekonomian, bagian ini lebih jauh akan membahas tentang Analisis Teori Neoliberalisme terhadap dua pelanggaran berat dalam kasus *Panama Papers Scandal* sebagai salah satu implikasi dari pembentukan zona deregulasi keuangan (*Tax Haven*) dan pengaruhnya terhadap perekonomian Negara Panama di tahun 2016-2021.

Selain itu, spesifikasi terkait deregulasi yang terjadi untuk meluncurkan iklim investasi dari Panama kemudian dijelaskan lebih rinci pada bab sebelumnya,

yang meliputi: (1) *Lax Company Incorporation Laws* yang mendorong pendirian bisnis cangkang yang dapat digunakan untuk menyembunyikan aset dan menghindari pajak; (2) *Minimal to full exemption of tax* untuk entitas perusahaan asing yang menciptakan iklim yang kondusif untuk penghindaran pajak dan; (3) *Limited regulatory oversight* yang memungkinkan tindak pencucian uang dan aktivitas melanggar hukum lainnya karena lembaga keuangan Panama beroperasi dengan pengawasan yang lebih rendah.

Adapun dua pelanggaran besar yang dimaksud adalah; (a) Praktik penghindaran pajak atau '*Tax evasion*'; dan (b) Tindak pencucian uang atau '*Money Laundering*' dari *Panama Papers Scandal* sebagai "implikasi dari zona deregulasi keuangan" yang terjadi di negara Panama dan analisis pengaruhnya terhadap perekonomian negara Panama dari tahun 2016-2021 yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

a. Praktik Penghindaran Pajak (Tax Evasion) pada Panama Papers Scandal dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Negara Panama

Seperti yang telah dibahas pada [Tabel 2](#), dalam bab 2 tentang para aktor besar politik yang terlibat isu *Panama Papers*, terdapat banyak aktor-aktor penting dari politik internasional yang terlibat dalam *Panama Papers Scandal* dan terbukti melakukan praktik penghindaran pajak dengan membuat "*shell companies*" untuk menyembunyikan aset mereka dengan bantuan *Mossack Fonseca Law Firm* demi menghindari pajak dari negara asal mereka. Bocoran tersebut mengungkap bagaimana *Mossack Fonseca Law Firm* telah membantu lebih dari 214.000 "*shell companies*", yang melibatkan para politisi terkemuka,

selebriti, dan individu-individu kaya dalam skema penghindaran pajak dan pencucian uang (Van Opdorp, 2017).

Selain itu, *Panama Papers* merupakan skema penghindaran pajak bagi para pemilik aset yang berpenghasilan tinggi dan menyoroti betapa mudahnya menyembunyikan kekayaan di negara suaka pajak (dilansir oleh *Tax Justice Network* terdapat sekitar \$32 triliun di rekening luar negeri atau *offshore account*) di mana hal ini juga disorot oleh media internasional. Oleh karena itu, informasi yang signifikan ini kemudian menampilkan *Panama Papers* salah satu isu skema penghindaran pajak yang sangat tinggi di dunia internasional (Ouali, 2019).

Untuk mendukung pernyataan sebelumnya, dikutip dari laporan “*Fiscal Panorama of Latin America and the Caribbean 2020*” yang disusun oleh *Economic Commission for Latin America and the Caribbean* (ECLAC), perkiraan atau estimasi dari tingkat penghindaran pajak untuk “*Corporate Income Tax*” di Negara Panama di tahun 2016 ketika *Panama Papers Scandal* terjadi berada dalam kategori yang cukup serius, yaitu di angka 72,70%. Sehingga, hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian Panama.

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh aktor-aktor penting politik internasional dan daftar panjang pihak-pihak yang terlibat dalam *Panama Papers Scandal* kemudian berdampak buruk dan dinilai merugikan perekonomian Panama. Oleh karena itu, kerugian negara Panama akibat penggelapan pajak membatasi kapasitas negara untuk melakukan kebijakan fiskal yang ekspansif untuk merangsang pemulihan dan berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan (ECLAC, 2021). Klaim ini didukung oleh perolehan data mengenai Rasio pajak

terhadap PDB (*Tax-to-GDP Ratio*) Panama yang tetap dalam kategori rendah sehingga mengindikasikan bahwa penghindaran pajak terus menjadi masalah yang signifikan bagi negara Panama (ICIJ, 2017).

Sehingga apabila bercermin dari data dari [Grafik 3.](#) yang terletak pada Bab 2 mengenai rasio pajak terhadap PDB Panama tahun 2019-2021, dapat dilihat telah terjadi tren penurunan rasio pajak terhadap PDB Panama antara tahun 2019 dan 2021 sebagai akibat dari tingginya tingkat pelanggaran penggelapan pajak di Negara Panama. Bahkan pada tahun 2019, pajak hanya menyumbang 14,10% dari PDB Panama secara keseluruhan. Selain itu, “Pandemi Covid-19” yang terjadi pada tahun 2020 juga telah memperburuk keadaan ekonomi Panama, sehingga semakin mengurangi rasio pajak terhadap PDB (*tax-to-gdp ratio*) Panama yang mencapai 12,70% pada tahun 2020 dan 12% pada tahun 2021 (ECLAC, 2021).

Untuk mendukung pernyataan sebelumnya, tingkat pendapatan negara Panama dari sisi pajak masih dalam kategori rendah, sebab bercermin dari rasio pajak terhadap PDB (*Tax-to-GDP Ratio*) rata-rata untuk 16 negara Negara Kawasan Amerika Latin yang tergolong masih rendah yaitu sebesar 19,8%, sangat jauh apabila angka rasio pajak tersebut dibandingkan dengan rata-rata rasio pajak untuk negara-negara OECD (*Organization for Economic and Operation*) yaitu sebesar 33,5% di tahun 2020 (OECD et al., 2022).

Selain tolak ukur *Tax-to-GDP ratio*, kerugian negara Panama akibat penggelapan pajak kemudian membatasi kapasitas negara untuk melakukan kebijakan fiskal yang ekspansif untuk merangsang pemulihan dan berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan. Negara-negara dengan tingkat penggelapan

pajak yang tinggi sering kali menjadi sasaran pengawasan dan mendapatkan sanksi internasional. Oleh karena itu, hal tersebut dapat merusak reputasi Panama dan mengurangi jumlah investasi asing yang masuk untuk Negara Panama. Di mana hal tersebut kemudian memperlambat pertumbuhan ekonomi Panama dengan membatasi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi dalam proyek-proyek pembangunan ekonomi dan infrastruktur (*Think Tank European Parliament*, 2017).

Oleh sebab itu, jelas dapat terlihat bahwa akibat penghindaran pajak (*tax evasion*) yang terjadi di negara Panama dan kaitannya dengan *Panama Papers Scandal* termasuk implikasi terhadap persepsi publik Panama yang buruk di dunia internasional membuat penerimaan negara Panama dari sektor pajak semakin berkurang. Jauh lebih sedikit apabila dibandingkan dengan negara lain yang memiliki regulasi perpajakan yang lebih kuat seperti negara-negara anggota OECD lainnya. Hal ini tercermin pada nilai rasio pajak terhadap GDP yang Panama yang sangat rendah disebabkan oleh tingginya angka penghindaran pajak, sehingga berimplikasi negatif terhadap perekonomian negara Panama secara umum.

b. Praktik Pencucian Uang (Money Laundering) pada Panama Papers Scandal dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Negara Panama

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, istilah pencucian uang memiliki kaitan yang sangat relevan dengan kasus *Panama Papers* karena kontroversi *Panama Papers* berperan dalam mengungkap longgarnya regulasi (deregulasi) di sektor keuangan Panama, sehingga memungkinkan *Mossack*

Fonseca beroperasi dengan pengawasan yang minim. Ditambah dengan kemampuan perusahaan untuk mendirikan “*Shell company*” dan rekening luar negeri tanpa pengawasan yang memadai menyebabkan meluasnya pencucian uang dan pelanggaran di sektor keuangan Panama.

Penyedia layanan korporat seperti *Mossack Fonseca* memainkan peran penting di Panama sebagai pihak ketiga untuk membentuk “*Shell company*”. Oleh karena itu, firma hukum *Mossack Fonseca* hanya diwajibkan untuk mengumpulkan informasi mengenai kepemilikan perusahaan (*beneficial ownership*) di awal hubungan mereka dengan klien. Mereka tidak diwajibkan untuk memperbarui informasi ini. Sehingga berbagai celah tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap berjalannya aturan-aturan ini, termasuk kemampuan *mossack fonsaca law firm* dalam menyembunyikan ketidakjelasan sumber-sumber dari aset yang dimiliki oleh pihak-pihak tertentu yang hendak melakukan tindakan pencucian uang (*Transparency International*, 2021).

Di samping itu, terdapat banyak cara untuk melakukan pencucian uang, para pemilik aset dapat mengalihkan transaksi yang ada kepada negara suaka pajak (*tax haven countries*) dan memasukkan keuntungan yang diperoleh ke dalam rekening bank di luar negeri seperti di Panama. Selain itu, mereka juga dapat memalsukan faktur atau nota pembayaran untuk membayar perusahaan atau rekanan di luar negeri untuk layanan yang tidak pernah terjadi. Taktik lain adalah menjual aset ke perusahaan luar negeri dengan nilai yang jauh lebih rendah, sehingga di samping terjadinya pemindahan kekayaan, hal ini juga memberikan penghapusan pajak (*tax write-off*) (Bernstein, 2019).

Terlepas dari kemudahan untuk melakukan pencucian uang di negara suaka pajak yang memiliki regulasi lemah akibat adanya deregulasi, penghindaran pajak juga menyebabkan ketidakstabilan di sektor keuangan akibat kurangnya transparansi dan akuntabilitas di sektor keuangan Panama (Cao et al., 2020). Sehingga, hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor yang pada akhirnya menyulitkan bisnis untuk mengakses modal dan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi di Negara Panama.

Data dari [Grafik 4](#), yang berasal dari bab 2 mengenai persentase *Foreign Direct Investment* (FDI) terhadap PDB Panama Tahun 2016-2021 menjelaskan sejauh mana tren penurunan angka persentase *Foreign Direct Investment* (FDI) terhadap total PDB Panama dari tahun 2016-2021. Di mana, persentase tersebut menurun sebanyak 7,10% dalam rentang waktu enam tahun. Data dari grafik ini menunjukkan angka 9,10% di tahun 2016 akan tetapi setelah berada dalam titik terendahnya yaitu -4,40% di tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19, kenaikan yang terjadi di tahun setelahnya yaitu sebesar 2% pada tahun 2021. Data tersebut merefleksikan seberapa besar kepercayaan investor untuk berinvestasi di negara Panama dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dari negara ini dari tahun ke tahun, sehingga dapat dikatakan bahwa setelah terjadinya *Panama Papers Scandal*, tingkat kepercayaan investor terhadap Panama semakin menurun.

Oleh karena itu, jelas dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang relevan antara tindak pelanggaran pencucian uang (*money laundering*) pada kasus *Panama Papers Scandal* di tahun 2016 dan implikasinya terhadap perekonomian

Negara Panama dari tahun 2016-2021. Sebab hubungan implikasi tersebut dapat didefinisikan oleh persepsi publik yang negatif terhadap negara Panama pasca isu *Panama Papers* dengan skeptisisme para investor untuk berinvestasi di negara ini. Lebih lanjut hal ini tentu saja mempengaruhi angka dari FDI yang menurun secara umum dan dapat diketahui melalui data *World Bank* terkait persentase FDI terhadap PDB dari negara Panama dari tahun 2016-2021 yang jelas menunjukkan adanya tren penurunan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di *Panama Papers* seperti; (a) Praktik penghindaran pajak atau '*Tax evasion*'; dan (b) Tindak pencucian uang atau '*Money Laundering*' serta kaitannya dengan indikator pembentukan zona deregulasi keuangan (*tax haven*) sebagai bagian dari variabel deregulasi di sektor perusahaan, kemudian memiliki hubungan yang relevan dengan keadaan perekonomian negara Panama dari tahun 2016-2021.

Sebab bagian ini secara garis besar menyoroti implikasi dari deregulasi yaitu penghindaran pajak menyebabkan penerimaan pajak yang cenderung lebih rendah di Negara Panama sebagai implikasi dari penghindaran pajak '*tax evasion*'. Di mana, hal ini tercermin pada nilai rasio pajak terhadap PDB (*Tax-to-GDP Ratio*) Panama yang sangat rendah dikarenakan tingginya angka penghindaran pajak, sehingga berimplikasi negatif terhadap perekonomian negara ini.

Selain itu, dampak lain yang harus ditanggung oleh Panama seperti persepsi publik yang negatif terhadap negara Panama pasca isu *Panama Papers*

dengan skeptisisme para investor untuk berinvestasi di negara ini akibat maraknya kejahatan pencucian uang ‘*money laundering*’, sehingga mempengaruhi angka dari FDI yang menurun secara umum dan dapat diketahui melalui data *World Bank* terkait persentase FDI terhadap PDB dari negara Panama yang jelas menunjukkan adanya tren penurunan dari tahun 2016-2021.

3.3.2. Liberalisasi Sektor Industri dan Perdagangan pada *Panama Papers Scandal* dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Panama

Seperti yang telah dibahas pada bab 2, liberalisasi di sektor industri dan perdagangan dalam konteks Panama telah menjadi komponen kunci dari strategi pembangunan ekonomi negara tersebut. Panama telah menerapkan berbagai langkah liberalisasi, termasuk pemberlakuan *free trade* atau perdagangan bebas. Oleh karena itu, indikator dari variabel liberalisasi sektor industri dan perdagangan adalah *free trade* atau perdagangan bebas.

Praktik umum dari perdagangan bebas adalah mengurangi hambatan regulasi untuk mendorong investasi dan perdagangan. Oleh karena itu, negara suaka pajak memanfaatkan situasi ini dengan menyediakan kerangka kerja peraturan liberal yang memungkinkan bisnis beroperasi dengan regulasi yang tidak begitu bersifat mengikat ataupun membatasi. Akibatnya, para pemilik aset dapat mengalihkan pendapatan mereka pada negara-negara dengan peraturan yang tidak terlalu ketat dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Prinsip-prinsip perdagangan bebas yang memfasilitasi pergerakan modal sehingga investor untuk memindahkan uang atau aset dengan melintasi batas-

batas negara di dunia internasional secara general. Selain itu, negara suaka pajak seperti Panama kemudian membantu mempermudah migrasi kapital tersebut dengan menyediakan lingkungan yang aman dan sering kali tidak transparan untuk aktivitas-aktivitas keuangan yang dimaksud. Akibat dari mobilitas keuangan ini, perusahaan dapat mengalihkan keuntungan mereka ke yurisdiksi dengan pajak rendah dan tetap mendapatkan keuntungan dari perdagangan global dan membayar pajak yang “lebih sedikit” dibandingkan dengan negara asal mereka yang memiliki pajak yang tinggi.

Liberalisasi di sektor industri keuangan kemudian telah menyebabkan peningkatan kekuasaan yang dapat digunakan oleh bank, termasuk keterlibatan dalam operasi perbankan yang non-tradisional. Di mana hal tersebut mencakup perizinan pada bank-bank yang ada untuk terlibat dalam kegiatan sekuritas dan jasa keuangan lainnya yang sebelumnya dianggap terlarang (tidak transparan). Dimana tindakan-tindakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetisi dan menarik modal asing yang sejalan dengan prinsip Panama sebagai suaka pajak.

a. Praktik “*Strict Banking Secrecy Laws*” pada *Panama Papers Scandal*

Liberalisasi pada sektor keuangan Panama ditandai dengan pembentukan Undang-Undang Dekrit 9 tahun 1998 (*Decree Law 9 of 1998*) yang telah mengalami revisi agar sesuai dengan norma-norma internasional kontemporer. Sehingga memungkinkan wewenang dan otonomi pengaturan dari “*Superintendency Bank*”. Hal tersebut membuat Panama dapat semakin memperkuat prinsip kerahasiaan yang ketat (*Strict Banking Secrecy Laws*) yang telah ada sebelumnya.

Perlindungan informasi perbankan dan bisnis adalah salah satu keuntungan yang diklaim dari negara suaka pajak seperti Panama. Dengan ini, pemilik perusahaan yang sebenarnya dapat membuat akun atau rekening yang tidak terdaftar secara publik karena prinsip kerahasiaan identitas pemilik perusahaan (Jalan dan Vaidyanathan, 2017).

Lebih lanjut, prinsip kerahasiaan kemudian yang menjadi dasar akan maraknya pembentukan perusahaan cangkang “*Shell companies*” yang menjadi data krusial yang dibocorkan pada *Panama Papers Scandal*. Dimana isu ini merupakan salah satu gambaran implikasi negatif dari variabel liberalisasi dan indikator perdagangan bebas di negara suaka pajak seperti Panama. Oleh karena itu, hal ini terbukti telah mempengaruhi penurunan “*capital flow*” yang bergerak menuju negara Panama ketika skandal ini terjadi.

b. Implikasi negatif “*Strict Banking Secrecy Laws*” pada *Panama Papers Scandal*

Klaim terkait dampak negatif dari “*Strict Banking Secrecy Laws*” pada *Panama Papers Scandal* kemudian didukung oleh data [Grafik 5](#) terkait “Volume ‘*Capital Flows*’ Negara Panama Tahun 2015-2017” dari *Trading Economics* yang menunjukkan adanya penurunan volume “*capital flow*” Panama setelah *Panama Papers Scandal* terjadi.

Pada grafik tersebut terlihat bahwa Pada Q3 tahun 2016, arus kapital Panama menurun secara signifikan menjadi -2.440 juta PAB atau sebesar -2.4 *billion* USD. Sehingga, jika dibandingkan dengan Q4 tahun 2015 maka total penurunan yang dialami sebesar -1.736 juta PAB atau setara dengan -\$1.736 juta

USD atau -1.7 *billion* USD. Selain itu, pada kuartal akhir tahun 2016, dan sepanjang kuartal tahun 2017 dapat terlihat bahwa arus kapital cenderung mengalami stagnasi dan masih berada pada angka rata-rata -1.1 *billion* USD (*Trading Economics*, 2018).

Oleh karena itu, insiden *Panama Papers* telah mengungkap konsekuensi ekonomi yang cukup besar akibat liberalisasi sektor jasa keuangan Panama. Perjanjian perdagangan bebas telah mendorong investasi, namun juga memudahkan perusahaan untuk mentransfer keuntungan ke negara-negara dengan tarif pajak rendah. *Decree Law 9 of 1998* memperkuat prinsip kerahasiaan perbankan yang ketat yang pada akhirnya memfasilitasi pertumbuhan perusahaan cangkang dan ketidaktransparansian keuangan. Akibatnya, aliran modal ke Panama menurun drastis yang menggarisbawahi dampak dari indikator liberalisasi ini terhadap ekonomi dan reputasi negara Panama.

3.3.3. Privatisasi Sektor Publik pada *Panama Papers Scandal* dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Panama

Berdasarkan data dari bab 2, Privatisasi sebagai elemen mendasar dari kebijakan Neoliberal sering kali dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan prospek produktivitas serta demi ekspansi perekonomian yang lebih besar untuk negara yang bersangkutan, dalam hal ini yaitu Negara Panama. Salah satu pilar utama strategi ekonomi di Panama adalah mendorong privatisasi sebagai cara untuk menarik investasi asing dan mendorong pembangunan perekonomian

(Honig, 2013). Di mana Indikator dari variabel privatisasi sektor publik adalah akuisisi terhadap *State Owned Enterprises* (SOEs) (Steger dan Roy 2010, hal. 41).

Penjelasan-penjelasan dari berbagai variabel dan indikator sebelumnya sangat relevan dan membuat urgensi yang lebih besar untuk melakukan privatisasi yang lebih bertahap privatisasi menjadi tidak begitu diperlukan untuk dilakukan lebih jauh. Mengingat Panama telah menerapkan sistem ekonomi liberal di sektor perbankan. Di mana masing-masing dari kebijakan Neoliberal seperti deregulasi dan liberalisasi pasar tersebut telah memenuhi tujuannya masing-masing.

Sehingga, berdasarkan konsep dan analisis sebelumnya penguraian terkait berbagai tahap privatisasi aset publik menjadi karena kebijakan ekonomi liberal telah menetapkan praktik yang mengutamakan prinsip-prinsip pasar yang adil bagi semua pihak serta mendukung intervensi pemerintah yang minimal.

Hal tersebut terutama terlihat dengan jelas di sektor perbankan Panama, di mana promosi dan deregulasi bank internasional telah menciptakan jaringan yang kompleks untuk transaksi dan pemindahan aset lintas batas yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan.

Sehingga, meskipun skandal *Panama Papers* menyoroti perlunya peningkatan pengawasan dan transparansi dalam masalah hukum, skandal ini juga menunjukkan bahwa sistem ekonomi liberal saat ini telah mencapai tujuannya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang menguntungkan, meskipun pada saat yang sama hal tersebut berarti pemerintah Panama mengurangi pentingnya peningkatan kewaspadaan terkait pelanggaran-pelanggaran yang sebagai implikasi negatif dari sistem kebijakan Neoliberalisme secara umum.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa proses privatisasi yang dilakukan oleh Negara Panama memiliki korelasi yang sangat relevan terhadap *Panama Papers Scandal* dan bagaimana hal tersebut terbukti mengakibatkan implikasi yang serupa dengan indikator-indikator lainnya sebagai imbas dari penerapan paket kebijakan (*policy package*) yang menjadi bagian dari salah satu variabel dalam Perspektif Neoliberalisme.

Tabel 3. Manifestasi Paket Kebijakan Teori Neoliberalisme

No	Bagian	<i>Deregulation of the Economy</i> (Deregulasi Ekonomi)	<i>Liberalization of Trade & Industry</i> (Liberalisasi Sektor Perdagangan & Industri)	<i>Privatization of Public Sector</i> (Privatisasi Sektor Publik)
1.	Definisi	Merupakan sejumlah besar peraturan yang ditargetkan untuk dihilangkan di sektor perekonomian	Merupakan pengurangan intervensi pemerintah dalam kegiatan perdagangan dan industri.	Merupakan tindakan penjualan aset negara kepada sektor swasta
2.	Indikator	Memiliki indikator Zona Deregulasi Keuangan (<i>Tax Haven</i>)	Memiliki indikator Pasar Bebas (<i>Free Trade</i>)	Memiliki indikator Akuisisi <i>State-Owned Enterprises</i> (SOEs)
3.	Implementasi	Adanya penghindaran pajak dan pencucian uang dalam <i>Panama Papers Scandal</i>	Adanya “ <i>Strict Bank Secrecy Laws</i> ” yang memungkinkan shell companies dapat beroperasi dengan ketidaktransparansian sebagai bagian dari <i>Panama Papers Scandal</i>	Adanya aktivitas korup dengan pembentukan <i>shell company</i> yang terlibat dalam <i>Panama Papers Scandal</i>
4.	Dampak	Mengakibatkan penurunan	Mengakibatkan penurunan volume	Mengakibatkan implikasi yang

	terhadap perekonomian	Rasio Pajak terhadap PDB Panama dari angka 14,10% menjadi 12% dan Persentase <i>Foreign Direct Investment</i> (FDI) terhadap PDB Panama dari angka 9,10% menjadi 2%	<i>capital flows</i> Panama dengan total sekitar -1.7 billion USD pada saat <i>Panama Papers Scandal</i> terjadi	sama dengan indikator lainnya seperti, penurunan Rasio Pajak terhadap PDB Panama, penurunan persentase <i>Foreign Direct Investment</i> (FDI) terhadap PDB Panama dari, serta mengakibatkan penurunan volume <i>capital flows</i> Panama pada saat <i>Panama Papers Scandal</i> terjadi
--	-----------------------	---	--	---

Berdasarkan tabel sebelumnya, dapat terlihat bahwa ketiga Variabel Neoliberalisme yang digunakan untuk menganalisis *Panama Papers Scandal* terbukti memiliki dampak negatif terhadap perekonomian Panama dari tahun 2016-2021. Di mana, variabel yang paling mempengaruhi dan merupakan salah satu faktor terjadinya *Panama Papers Scandal* adalah “Deregulasi di sektor perekonomian” dengan indikator zona deregulasi keuangan. Sebab berdasarkan penjelasan di bab 2, sejarah mengenai deregulasi di sektor keuangan Panama telah membentuk identitas negara tersebut sebagai salah satu *Tax Haven Countries* yang paling berpengaruh di dunia, yang memainkan peran penting dalam skema pelanggaran penghindaran pajak dan pencucian uang akibat kurangnya transparansi yang disebabkan oleh adanya deregulasi di sektor perekonomian negara tersebut.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa aplikasi dari Teori Neoliberalisme membantu studi ini untuk menganalisis implikasi dari *Panama Papers Scandal* yang secara umum merugikan perekonomian Panama dari tahun 2016-2021. Terlebih dengan masing-masing variabel yang mempengaruhi secara langsung elemen dalam perekonomian Panama seperti: indikator deregulasi yang mempengaruhi penurunan *Tax-to-GDP ratio* dan FDI Panama, indikator liberalisasi yang mempengaruhi penurunan volume “*capital flows*” Panama, serta indikator privatisasi yang memiliki implikasi yang sama dengan indikator yang lain terhadap Panama. Di mana masing-masing implikasi tersebut memiliki korelasi secara langsung dengan *Panama Papers Scandal*.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Isu “*Panama Papers Scandal*” merupakan sebuah skandal besar di sektor perekonomian global yang melibatkan banyak tokoh besar di berbagai belahan dunia. Kasus ini merupakan salah satu kasus skandal yang termasuk dalam *whistleblower case* terbesar di dunia sampai saat ini. Dalam proses pengungkapannya, tercatat sejumlah 11,5 juta dokumen yang bocor ke ranah publik dalam kasus “*Panama Papers Scandal*” dan menunjukkan daftar panjang para politisi, kriminal atau penjahat, beserta para selebritis yang menggunakan negara suaka pajak “*Tax Haven*” sebagai tempat untuk menyimpan harta kekayaan yang mereka miliki dan demi menghindari pajak di negara asal mereka.

Latar belakang Panama sebagai *Tax Haven Country* dan hal inilah yang menjadi alasan di balik isu “*Panama Papers Scandal*” yang melibatkan banyak pemimpin di dunia ekonomi politik internasional. Kurangnya transparansi dan tingginya kerahasiaan yang tercermin dalam kapabilitas Panama dalam mengimplementasikan AEOI (*The Automatic Exchange of Information*) sebagai salah satu kemudian menyulitkan pemerintah asing untuk melacak dan mengenakan pajak atas pendapatan yang dihasilkan dari berbagai transaksi yang dilakukan.

Publisitas terhadap *Panama Papers Scandal* kemudian memiliki implikasi negatif terhadap perekonomian Negara Panama. Sehingga, dalam penelitian

terkait analisis Neoliberalisme terhadap Isu *Panama Papers Scandal* pada perekonomian negara Panama dari Tahun 2016-2021 ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemerintah Panama mengaplikasikan ketiga variabel Neoliberalisme yang digunakan dan korelasinya terhadap *Panama Papers Scandal* yang merugikan perekonomian Panama. Variabel-variabel tersebut diantaranya yaitu; (1) *Ideology*; (2) *Mode of Governance*; dan (3) *Policy Package*. Di mana, indikator dari paket kebijakan Neoliberalisme terdiri atas, “Deregulasi yang memiliki indikator zona deregulasi keuangan (*tax haven*), liberalisasi di sektor industri dan perdagangan dengan indikator *free trade*, serta privatisasi berbagai aset milik pemerintah yang memiliki indikator akuisisi *State Owned Enterprises (SOEs)*).

Di mana, indikator zona deregulasi keuangan (*tax haven*) dari *policy package* deregulasi menyebabkan penurunan “*Tax-to-GDP ratio*” dan persentase “*Foreign Direct Investment*” Panama dari tahun 2016-2021. Indikator *free trade* dari *policy package* liberalisasi menyebabkan penurunan angka *capital flows* Panama pada beberapa kuartal di tahun 2016-2017. Serta indikator akuisisi *State Owned Enterprises (SOEs)* dari *policy package* privatisasi memiliki implikasi yang sama dengan indikator lain terhadap Panama.

Oleh karena itu, secara umum *Panama Papers Scandal* memiliki implikasi negatif terhadap perekonomian Panama mulai dari sisi penerimaan pajak negara yang kurang, menurunnya angka investasi asing yang masuk maupun angka *capital flows* yang juga menurun akibat penurunan angka registrasi perusahaan

yang sebagian besar mempengaruhi oleh sektor jasa finansial Panama yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Panama secara umum.

4.2 Rekomendasi

Penelitian kualitatif ini menggunakan studi pustaka sehingga sebagian besar data yang diperoleh merupakan data sekunder dari buku, jurnal, berita, dan laporan pemerintah atau organisasi internasional. Penulis menyadari bahwa sebagian besar penelitian yang ada cenderung berfokus pada implikasi *Panama Papers Scandal* terhadap dinamika ekonomi politik global dan cenderung tidak berfokus pada analisis Neoliberalisme terhadap *Panama Papers Scandal* pada perekonomian Panama dari tahun 2016-2021 sebagai salah satu “*Tax Haven Countries*”. Sehingga, rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya ada penelitian lanjutan terkait analisis Neoliberalisme terhadap *Panama Papers Scandal* pada perekonomian Panama dari tahun 2016-2021 dengan menggunakan sudut pandang baru dengan variabel, indikator, atau teori yang berbeda untuk melengkapi literatur yang ada mengenai kasus *Panama Papers Scandal* ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alldrige, Peter. 2001. "Are Tax Evasion Offences Predicate Offences for Money Laundering Offences?" *Journal of Money Laundering Control* 4 (4): 350–59. <https://doi.org/10.1108/eb027286>.
- Anholete, Andressa. 2016. "Officials in Latin America Linked to 'Panama Papers' :." April 4, 2016. <https://ticotimes.net/2016/04/04/officials-latin-america-linked-panama-papers>.
- Asian Development Bank. 2018. "Asian Development Bank Annual Report 2017: Sustainable Infrastructure for Future Needs." ADB Annual Reports. 0 ed. ADB Annual Reports. Manila, Philippines: Asian Development Bank. <https://doi.org/10.22617/FLS189307>.
- Bawa, Harshivam. 2020. "Ethics Paper: Ethical Issues Surrounding Mossack Fonseca Law Firm." March 22, 2020. <https://bawaharshivam.wixsite.com/hbawa/post/surprising-ways-music-affects-your-mind>.
- Bernstein, Jake. 2019. *The Laundromat: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite*.
- Boas, Taylor C., and Jordan Gans-Morse. 2009. "Neoliberalism: From New Liberal Philosophy to Anti-Liberal Slogan." *Studies in Comparative International Development* 44 (2): 137–61. <https://doi.org/10.1007/s12116-009-9040-5>.
- Cao, Zheng Chris, Chris Jones, and Yama Temouri. 2020. "Tax Havens and Tourism: The Impact of the Panama Papers and the Crowding Out of Tourism by Financial Services." *Journal of Travel Research* 63 (4): 841–57. <https://doi.org/10.1177/00472875231179395>.
- Chohan, Usman W. 2016. "The Panama Papers and Tax Morality." *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2759418>.
- "COMPENDIUM OF AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR PROGRAMMES." 2020. *World Customs Organization*. <https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/aeo-compendium.pdf?db=web>.
- Dharmapala, Dhammika. 2023. "Overview of the Characteristics of Tax Havens." *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4437487>.
- Driesen, David M. 2000. "What Is Free Trade? The Real Issue Lurking Behind the Trade and Environment Debate." SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY. <https://doi.org/10.2139/ssrn.217412>.
- "Ending Tax Evasion and Illicit Financial Flows: A Policy Imperative for Latin America and the Caribbean." 2021. *Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)*.
- Esoimeme, Ehi Eric. 2016. "Wealth Management, Tax Evasion and Money Laundering: The Panama Papers Case Study." *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2790543>.
- Evertsson, Nubia. 2020. "Corporate Tax Avoidance and Neutralization Techniques: A Case Study on the Panama Papers." *Critical Criminology* 28 (4): 721–38. <https://doi.org/10.1007/s10612-019-09455-7>.

- Fitzgibbon, Will. 2018. "New Panama Papers Leak Reveals Mossack Fonseca's Chaotic Scramble." June 20, 2018.
<https://www.icij.org/investigations/panama-papers/new-panama-papers-leak-reveals-mossack-fonseca-chaotic-scramble/>.
- Gallego, Cecile S. 2017. "More than \$500 Million Recovered by Tax Authorities Worldwide Following the Panama Papers - ICIJ." December 27, 2017.
<https://www.icij.org/inside-icij/2017/12/500-million-recovered-tax-authorities-worldwide-following-panama-papers/>.
- Gladstone, Rick. 2016. "Iceland's Prime Minister Steps Down Amid Panama Papers Scandal - The New York Times." 2016.
<https://www.nytimes.com/2016/04/06/world/europe/panama-papers-iceland.html>.
- Harding, Luke. 2016a. "Ukraine's Leader Set up Secret Offshore Firm as Battle Raged with Russia." *The Guardian*, April 4, 2016, sec. News.
<https://www.theguardian.com/news/2016/apr/04/panama-papers-ukraine-petro-poroshenko-secret-offshore-firm-russia>.
- . 2016b. "What Are the Panama Papers? A Guide to History's Biggest Data Leak." *The Guardian*, April 5, 2016, sec. News.
<https://www.theguardian.com/news/2016/apr/03/what-you-need-to-know-about-the-panama-papers>.
- Henley, Jon. 2016. "Iceland PM Steps aside after Protests over Panama Papers Revelations." *The Guardian*, April 5, 2016, sec. World news.
<https://www.theguardian.com/world/2016/apr/05/iceland-prime-minister-resigns-over-panama-papers-revelations>.
- Hira, Andy, Brian Murata, and Shea Monson. 2016. "Understanding Offshore Finance: The Panama Papers in Perspective," March.
 "Historical Review | Superintendencia de Bancos de Panamá." n.d. Accessed September 25, 2024. <https://www.superbancos.gob.pa/en/about-sbp/historical-review>.
- Honig, Bonnie. 2013. "The Politics of Public Things: Neoliberalism and the Routine of Privatization_."
- "ICIJ Offshore Leaks Database." n.d. Accessed September 9, 2024.
<https://offshoreleaks.icij.org/>.
- Jalan, Akanksha, and R. Vaidyanathan. 2017. "Tax Havens: Conduits for Corporate Tax Malfeasance." *Journal of Financial Regulation and Compliance* 25 (1): 86–104. <https://doi.org/10.1108/JFRC-04-2016-0039>.
- Kenton, Will. 2022. "The Panama Papers Scandal: Who Was Exposed & Consequences." Investopedia. 2022.
<https://www.investopedia.com/terms/p/panama-papers.asp>.
- Khan, Sana Naveed, Savera Shami, and Ayesha Ashfaq. 2019. "Coverage of Panama Cases Trial in Pakistan by International Media; Disqualification of Prime Minister Nawaz Sharif." *Journal of the Research Society of Pakistan* 56 (1).
- Kinner, Marina, and Leonard W. Vona. n.d. "Shell Companies." *Siena College*.
- Mackert, Jürgen, and Bryan S. Turner, eds. 2017. *Why We Need a New Political Economy of Citizenship: Neo-Liberalism, the Bank Crisis and the 'Panama Papers'*. London ; New York: Routledge, Taylor & Francis Group.

- Marris, Johanna. 2016. "Panama Papers Expose Latin America's Networks of Financial Secrecy." *NotiSur*, May.
<https://digitalrepository.unm.edu/notisur/14423>.
- "Mergers & Acquisitions (M&A)." n.d. Corporate Finance Institute. Accessed September 10, 2024.
<https://corporatefinanceinstitute.com/resources/valuation/mergers-acquisitions-ma/>.
- Monbiot, George. 2016. "Neoliberalism – the Ideology at the Root of All Our Problems." *The Guardian*, April 15, 2016, sec. Books.
<https://www.theguardian.com/books/2016/apr/15/neoliberalism-ideology-problem-george-monbiot>.
- Obermayer, Bastian, and Frederik Obermaier. 2017. *The Panama Papers: Breaking the Story of How the Rich and Powerful Hide Their Money*. Revised edition. London: Oneworld.
- O'Donovan, James, Hannes F. Wagner, and Stefan Zeume. 2018. "The Value of Offshore Secrets – Evidence from the Panama Papers." SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2771095>.
- O'Donovan, James, Hannes Wagner, and Stefan Zeume. 2019. "The Value of Offshore Secrets: Evidence from the Panama Papers." *The Review of Financial Studies* 32 (11): 4117–55.
- OECD, Inter-American Center of Tax Administrations, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, and Inter-American Development Bank. 2022. *Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2022*. Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean. OECD.
<https://doi.org/10.1787/58a2dc35-en-es>.
- "Offshore Financial System - Global Financial Integrity." n.d. Accessed August 1, 2024. <https://gfintegrity.org/issue/offshore-financial-system/>.
- Okunade. 2024. "Neoliberal Conditions: Global Institutions' Impact on Developing Nations." *LSE International Development* (blog). March 28, 2024.
<https://blogs.lse.ac.uk/internationaldevelopment/2024/03/28/neoliberal-conditions-global-institutions-impact-on-developing-nations/>.
- Ouali, Laila. 2019. "Top Income Tax Evasion and Redistribution Preferences: Evidence from the Panama Papers." AMSE Working Paper 1901. Aix-Marseille School of Economics, France.
<https://econpapers.repec.org/paper/aimwpaimx/1901.htm>.
- "Panama | STEP." 2021. 2021.
<https://www.step.org/directory/jurisdictions/panama>.
- "Panama Capital Flows." n.d. Accessed September 25, 2024.
<https://tradingeconomics.com/panama/capital-flows>.
- "Panama: Corporate Service Providers Still Guarding Anonymous...." 2021. Transparency.Org. September 30, 2021.
<https://www.transparency.org/en/news/panama-corporate-service-providers-beneficial-ownership-panama-papers>.
- "Panama: First Review Under the Arrangement Under the Precautionary and Liquidity Line-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Panama." 2021. IMF. August 2, 2021.
<https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/08/02/Panama-First->

- Review-Under-the-Arrangement-Under-the-Precautionary-and-Liquidity-Line-Press-463338.
- “Panama: Selected Issues.” 2020. IMF. 2020.
<https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/04/21/Panama-Selected-Issues-49355>.
- “Panama: Technical Assistance Report-Monetary and Financial Statistics.” n.d. IMF. Accessed August 1, 2024.
<https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/02/03/Panama-Technical-Assistance-Report-Monetary-and-Financial-Statistics-50056>.
- Peck, Nicholas. 2016. “Implications of the Panama Papers for Panama and Beyond - Nardello & Co. | Nardello & Co. | We Find Out.” May 1, 2016.
<https://www.nardelloandco.com/insights/implications-of-the-panama-papers-for-panama-and-beyond/>.
- Prasad. 2023. “What Is Panama Papers Scandal ? | Prasad Knowledge Base.” 2023. <https://www.prasadcpa.com/blog/the-panama-papers-explained/>.
- “Press & Downloads - Global Corruption Barometer 2017 - GCB.” n.d. Transparency.Org. Accessed August 1, 2024.
<https://www.transparency.org/en/gcb/global/global-corruption-barometer-2017/press-and-downloads>.
- Protection, Offshore. 2022. “Panama’s Secrecy Laws.” Offshore-Protection.Com. August 26, 2022. <https://www.offshore-protection.com/panama-secrecy-laws>.
- Rettig, Charles P. 2016. “The Panama Papers and Lessons Learned from Years of Offshore Leaks.” SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY.
<https://papers.ssrn.com/abstract=2796347>.
- Rutar, Tibor. 2023. “What Is Neoliberalism Really? A Global Analysis of Its Real-World Consequences for Development, Inequality, and Democracy.” *Social Science Information* 62 (3): 295–322.
<https://doi.org/10.1177/05390184231202950>.
- Schjelderup, Guttorm. 2016. “How Panama Became a Tax Haven | NHH.” April 13, 2016. <https://www.nhh.no/en/nhh-bulletin/article-archive/older-articles/2016/april/how-panama-became-a-tax-haven/>.
- Steger, Manfred B., and Ravi K. Roy. 2010. *Neoliberalism: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/actrade/9780199560516.001.0001>.
- Thanasegaran, Haemala, and Bala Shanmugam. 2007. “International Trade-Based Money Laundering: The Malaysian Perspective.” *Journal of Money Laundering Control* 10 (October):429–37.
<https://doi.org/10.1108/13685200710830916>.
- “The Panama Papers: Exposing the Rogue Offshore Finance Industry - ICIJ.” 2016. April 3, 2016. <https://www.icij.org/investigations/panama-papers/>.
- The Society of Trust and Estate Practitioners. 2023. “Costa Rica and Panama Meet International AML and Transparency Standards | STEP.” November 1, 2023. <https://www.step.org/industry-news/costa-rica-and-panama-meet-international-aml-and-transparency-standards>.
- Think Tank, European Parlement. 2017. “The Impact of Schemes Revealed by the Panama Papers on the Economy and Finances of a Sample of Member States | Think Tank | European Parliament.” March 4, 2017.

- [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU\(2017\)572717](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2017)572717).
- Thorsen, Dag Einar, and Amund Lie. 2006. "What Is Neo-Liberalism." *University of Oslo, Department of Political Science*, 1–21.
- Trautman, Lawrence J. 2017. "Following the Money: Lessons from the Panama Papers, Part 1: Tip of the Iceberg." *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.2783503>.
- Van Opdorp, Davis. 2017. "The Biggest Tax Evasion Data Leaks in History – DW – 11/07/2017." Dw.Com. November 7, 2017.
<https://www.dw.com/en/from-panama-to-paradise-the-biggest-tax-evasion-data-leaks-in-history/a-41277967>.
- Wicaksono, Samudera, Nurfi Afriansyah Audi, Akbar Rachmaddi, and Raden Imaduddin. 2021. "TAX EVASION AND FRAUD SCANDAL IN PANAMA PAPER CASE." *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 5 (1): 590–95.
<https://doi.org/10.29040/ijebar.v5i1.1741>.
- "World Bank Open Data." 2022. World Bank Open Data. 2022.
<https://data.worldbank.org>.
- "———." n.d. World Bank Open Data. Accessed September 10, 2024.
<https://data.worldbank.org>.
- Zamorano, Juan. 2024. "A Trial Is Underway for the Panama Papers, a Case That Changed the Country's Financial Rules | AP News." April 19, 2024.
<https://apnews.com/article/panama-papers-odebrecht-trial-50e8e62ae2021c417e49751d7cfe0331>.